

Piutang Pajak Rp15 Triliun
Belum Ditagih

Hal 4

Presiden Puji Kerja Cepat BPK

Hal 20

BPK Usulkan *Parallel Audit*
dalam Pertemuan SC WGEI

Hal 33



ASA PEMULIHAN Pertumbuhan Ekonomi



LFAR Perkuat
Nilai Tambah Laporan
Pemeriksaan di Daerah



INDONESIA
MAJU



Tahun ini, Indonesia memeringati ulang tahun ke-75 dengan suasana berbeda. Ancaman pandemi Covid-19 masih membayangi seluruh warga di Tanah Air dan dunia.

Angka penderita dan jumlah kematian pun terus bertambah setiap harinya. Sementara, obat untuk melawan penyakit ini belum kunjung ada.

Indonesia, seperti juga negara-negara lain, tak hanya menghadapi masalah kesehatan lantaran Covid-19. Isu ekonomi dan ancaman resesi juga menjadi hal yang harus dihadapi saat ini akibat penyebaran penyakit yang sangat massif dan cepat.

Dengan suasana seperti itu kita merayakan HUT ke-75 kemerdekaan RI. Bahkan, rangkaian upacara peringatan HUT pun diselenggarakan dengan berbeda. Rangkaian itu digelar dengan mengedepankan protokol kesehatan. Yaitu dengan membatasi peserta upacara dan menggunakan teknologi virtual.

Meskipun begitu, kita tidak boleh patah semangat. Warna ini yang *Warta Pemeriksa* bawa pada edisi Agustus kali ini. Beberapa yang redaksi soroti antara lain penyampaian RUU APBN 2021 dan nota keuangan yang dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan anggota legislatif pada Jumat (14/8).

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam RAPBN 2021. Dalam asumsi tersebut, Presiden mene-

kankan, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat bergerak positif seiring dengan perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Hal lain yang redaksi soroti adalah prestasi BPK RI yang disampaikan Presiden. Beliau memuji langkah cepat dan cermat BPK di tengah pandemi Covid-19, khususnya dalam upaya mengawal keuangan negara.

Sementara itu, di rubrik BPK Bekerja, redaksi juga menyiapkan beberapa laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK. Antara lain, terkait dengan piutang pajak Rp15 triliun yang belum ditagih. Kemudian pengelolaan investasi Asabri dan penyaluran dana sawit yang masih bermasalah.

Simak juga wawancara eksklusif *Warta Pemeriksa* dengan Menkeu Sri Mulyani terkait RAPBN 2021. Kemudian wawancara dengan Ketua DPD La Nyala Mahmud Mattalitti mengenai hubungan DPD dengan BPK.

Jangan lewatkan tulisan menarik dari Kepala Badan Diklat PKN BPK Hery Subowo. Dalam tulisan ini, dia berbicara tentang bagaimana mengenal kompetensi ASN dengan menggunakan perspektif *goweser*.

Masih banyak informasi menarik lain yang telah redaksi siapkan untuk pembaca sekalian. Kami juga tidak bosan untuk mengingatkan agar pembaca tetap menjaga semangat dan kesehatan. Memang kita sedang menghadapi masa yang sulit. Tapi justru pada saat seperti ini biasanya kesempatan untuk maju itu selalu datang. ●

TIM EDITORIAL

Pengarah

Agung Firman Sampurna
Agus Joko Pramono
Bahrullah Akbar
Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Sri Haryati

Kepala Sekretariat

Trisari Istiati

Sekretariat

Bestantia Indraswati
Klara Ransingin
Ridha Sukma
Sigit Rais
Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI
Jalan Gatot Subroto no 31
Jakarta
Telepon: 021-25549000
Pesawat 1188/1187
Faksimili: 021-57854096
Email: wartabpkri@gmail.com
www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh

Sekretariat Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

PIUTANG PAJAK RP15 TRILIUN BELUM DITAGIH

- 4** BPK mendorong DJP membuat sistem informasi yang andal dalam pembaruan data piutang pajak.
- 8** PENYALURAN DANA SAWIT BERMASALAH
- 11** ASA PEMULIHAN PERTUMBUHAN EKONOMI
- 13** PROGRAM PEMULIHAN TERUS BERLANJUT
- 15** PERBAIKI PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
- 17** LPDP: KAMI GERAK CEPAT SELESAIKAN REKOMENDASI BPK
- 18** LPAR PERKUAT NILAI TAMBAH LAPORAN PEMERIKSAAN DI DAERAH

PRESIDEN PUJI KERJA CEPAT BPK

- 20** Menurut Presiden Jokowi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019.

- 22** **AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI**, KETUA DPD
"PRESTASI BPK JADI PELECUT"

- 25** **PROF MARDIASMO**, KETUA IAI
"KESEMPATAN EMAS SENTUH MASYARAKAT LANGSUNG"

- 27** PEMERIKSAAN KINERJA BANTU PEMDA
CAPAI TARGET

- 30** MENGUJI KONSISTENSI DJP TERHADAP
WAJIB PAJAK

BPK DAN PBB BAHAS PERKEMBANGAN PENCAPAIAN SDGS DAN PENANGANAN COVID-19

- 32** PBB mendukung pelaporan Voluntary National Review mengingat laporan ini juga memuat perkembangan dan tantangan yang dihadapi pemerintah.

BENAH PENGELOLAAN INVESTASI ASABRI

- 6** Terdapat penurunan signifikan atas akumulasi iuran pensiun (AIP) tahun 2019 sebesar Rp7,52 triliun (29,85 persen) dari tahun 2018.

- 33** BPK USULKAN *PARALLEL AUDIT*
DALAM PERTEMUAN SC WGEI

- 34** **VINCENTIA MOLI AMBAR WAHYUNI**,
KEPALA BPK PERWAKILAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
"TEGAS MENEGAKKAN INTEGRITAS"

- 38** BISNIS PEMPEK, TAK LEKANG OLEH WAKTU

- 41** TINDAK LANJUTI REKOMENDASI BPK



BPK PERKUAT KERJA SAMA DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM

- 42** MoU sebelumnya hanya terkait penegakan hukum atas hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi.

- 44** BHRULLAH AKBAR BUKA ORIENTASI
KEPALANGMERAHAN

- 45** TANTANGAN PENYERAPAN ANGGARAN

- 46** MENGENAL KOMPETENSI ASN
DARI PERSPEKTIF *GOWESER*

- 51** PEMANFAATAN SAI PMF, WUJUD SEMANGAT BPK
DALAM MEMBERI NILAI DAN MANFAAT
BAGI MASYARAKAT

- 55** BERITA FOTO



Piutang Pajak Rp15 Triliun Belum Ditagih

BPK mendorong DJP membuat sistem informasi yang andal dalam pembaruan data piutang pajak.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019 meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk lebih tertib dan terus melakukan pembaruan data terkait piutang pajak. Sebab, BPK sering menemukan bahwa Ditjen Pajak tidak memasukkan data terbaru piutang pajak.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode

Nusriadi menjelaskan dokumen sumber yang digunakan oleh DJP sebagai dasar pencatatan dan penagihan piutang pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP). STP memuat jumlah kekurangan pajak yang masih harus disetor oleh WP berdasarkan hasil analisis DJP terhadap data Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT) dari WP dan data lain yang diperoleh DJP dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lainnya (ILAP).

Sedangkan SKP memuat jumlah kekurangan pajak yang masih harus disetor oleh WP berdasarkan hasil pemeriksaan DJP dan konfirmasi DJP atas faktur pajak dan/atau bukti pemotongan pajak WP.

Laode menambahkan, permasalahan piutang pajak merupakan temuan berulang dalam pemeriksaan LKPP yang belum tuntas tindak lanjutnya. “Pada tahun 2017 BPK sudah meminta Kementerian Keuangan untuk memutakhirkan sistem informasi terkait pencatatan dan pelaporan piutang pajak,” ucap dia.

Pada pemeriksaan LKPP 2019, piutang pajak menjadi salah satu temuan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, DJP belum menerbitkan surat tagihan pajak (STP) atas kekurangan setor pokok pajak sebesar Rp12,64 triliun dan keterlambatan penyetoran pajak dengan sanksi sebesar Rp2,69 triliun. Dengan demikian, ada kekurangan penerimaan yang masih harus ditagih kepada wajib pajak (WP) per 31 Desember 2019 sebesar Rp15,33 triliun.

Permasalahan lainnya menyangkut kelemahan pengendalian internal, masih ditemukan SKP yang diterbitkan secara manual tanpa melalui sistem informasi di DJP dan terlambat dimasukkan ke dalam sistem informasi. “Atas SKP manual tersebut, DJP telah menindaklanjutinya selama pemeriksaan BPK berlangsung dengan menginputnya ke dalam sistem informasi, sedangkan permasalahan STP yang belum diterbitkan sebesar Rp15,33 triliun belum selesai ditindaklanjuti,” kata Laode.

Ia menambahkan, DJP perlu lebih tertib dalam menerbitkan STP maupun SKP sebagai dasar pencatatan dan penagihan piutang pajak dan memasukkan ke dalam sistem informasi. Ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terlambat menerbitkan STP atau SKP, dan atas STP atau SKP yang telah diterbitkan secara manual juga ada yang terlambat diinput ke dalam sistem informasi.

DJP juga perlu cepat memperbarui data restitusi pajak. Berdasarkan undang-undang, WP bisa mengajukan keberatan terhadap utang pajak yang dimiliki. Data restitusi pajak tersebut dapat digunakan sebagai kompensasi penyelesaian utang pajak WP.

“Kami mendorong ini segera diintegrasikan ke dalam sistem, jadi update terus piutang pajak. Jangan sampai ada STP dan SKP yang belum terbit, atau telah diterbitkan namun belum dilaporkan sebagai piutang. Ini berisiko karena tidak disajikan sebagai piutang dan malah dicatat di luar. Kami minta dimutakhirkan,” ucap dia.

AKN II, kata Laode, juga mencatat laporan terkait barang sitaan dan agunan yang tidak disajikan

secara memadai dalam laporan keuangan, padahal barang sitaan dan agunan diperhitungkan sebagai pengurang piutang pajak.

“Hal-hal ini yang kami sampaikan seharusnya di-update secara periodik dan dimasukkan secara tertib ke sistem informasi. Karena kita lihat kantar pajak kan tersebar di seluruh Indonesia, bila tidak diinput ke sistem informasi, maka nantinya kewalahan sendiri,” ucap dia.

Oleh karena itu, BPK mendorong DJP membuat sistem informasi yang andal dalam pembaruan data piutang pajak. Sehingga, data yang disajikan dalam laporan keuangan angkanya benar-benar valid dan *reliable*, termasuk putusan hukum maupun barang sitaan.

“Kami mendorong DJP sharing data dengan Mahkamah Agung terkait putusan-putusan maupun upaya hukum wajib pajak, apakah sudah *inkracht* atau belum, lalu apa saja keputusannya,” ucap dia.

Ia juga berpesan agar piutang pajak ini benar-benar dibereskan. Sebab, piutang pajak ada jangka waktunya. “Kalau piutang ini tidak terawasi dengan baik, maka upaya penagihannya tidak efektif.

▶ Rekomendasi BPK

- Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid.
- Memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi dengan SI DJP.
- Menginstruksikan pejabat dan petugas di KPP dan Kanwil agar lebih cermat dan tertib dalam melakukan penginputan dokumen sumber pencatatan piutang ke dalam SI DJP.
- Segera menyelesaikan dan menetapkan regulasi terkait saat penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo sehingga Pemerintah dapat segera mengakui haknya dari denda atau bunga per 31 Desember.

Untuk mengatasi permasalahan piutang pajak tersebut Menteri Keuangan telah menyampaikan rencana aksi (*action plan*) antara lain akan melakukan pemutakhiran sistem informasi piutang pajak dan mengimplementasikan *Revenue Accounting System* (RAS) untuk membentuk akun piutang pajak. Menteri Keuangan juga akan mengkaji kembali regulasi penerbitan STP atas pembayaran pajak yang melewati jatuh tempo dan merumuskan kembali manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 terkait penerbitan STP dengan memperhatikan potensi penagihan pokok pajak dan denda/sanksi administrasi yang seharusnya. ●

Benahi Pengelolaan Investasi Asabri

Terdapat penurunan signifikan atas akumulasi iuran pensiun (AIP) tahun 2019 sebesar Rp7,52 triliun (29,85 persen) dari tahun 2018. Penurunan AIP tersebut sebagian besar disebabkan dari kerugian atas penurunan nilai aset saham dan reksadana yang bersumber dari AIP Asabri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 26 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dalam

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun anggaran 2019. Salah satu temuan SPI tersebut berkaitan dengan PT Asabri (Persero).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) SPI di LKPP 2019, penyajian akun-akun LKPP terkait penyerahan modal pemerintah pada Asabri dan nilai akumulasi iuran pensiun (AIP) yang dikelola Asabri belum didukung laporan keuangan PT Asabri Tahun 2019 (Audited). Selain itu, kewajiban pemerintah selaku pemegang saham pengendali Asabri belum diukur atau diestimasi.

Mengenai AIP, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penurunan nilai investasi dari AIP Asabri tahun 2019 belum diukur secara akurat. AIP merupakan dana dari iuran anggota TNI dan Polri beserta hasil pengembangannya yang dikuasai pemerintah dan dititipkan kepada Asabri untuk dikelola.

Berdasarkan LK Asabri tahun 2019 (Audited) terdapat penurunan signifikan atas AIP tahun 2019 sebesar Rp7,52 triliun (29,85 persen) dari tahun 2018. Penurunan AIP tersebut sebagian besar disebabkan dari kerugian atas penurunan nilai aset saham dan reksadana yang bersumber dari AIP Asabri.

Rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah

- a. Bersama dengan Menteri BUMN selaku pemegang saham untuk:
 - Meminta PT Asabri (Persero) untuk memperbaiki penyajian investasi pada laporan keuangan tahun 2018 dan 2019, menyelesaikan laporan keuangan tahun 2019 (Audited), dan merencanakan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 untuk mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP tahun 2020.
 - Mengukur kewajiban pemerintah sebagai pengendali PT Asabri (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014.
- b. Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Penurunan AIP tersebut disebabkan adanya pengakuan rugi investasi atas penurunan harga pasar aset investasi saham dan reksadana yang bersumber dari AIP Asabri dengan nilai kerugian masing-masing sebesar Rp6,63 triliun dan Rp3,89 triliun. Pengukuran nilai rugi aset investasi akibat penurunan harga pasar aset saham dan reksadana tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya.

Ada beberapa hal yang membuat pengukuran nilai rugi aset investasi tidak dapat diyakini kewajarannya. Pertama, opini atas LK Asabri tahun 2018 adalah tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*). Kantor akuntan publik (KAP) tidak dapat meyakini kewajaran penyajian nilai efek-efek atas saham dan reksadana Asabri tahun 2018, termasuk saham dan reksadana yang bersumber dari AIP. Asabri diketahui mengukur nilai wajar saham dengan harga pasar menggunakan indeks harga saham pada Bursa Efek Indonesia serta nilai wajar reksadana dengan menggunakan nilai aktiva bersih reksadana.

Pengukuran tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan PMK Nomor 174/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI. Namun, KAP menilai pengukuran tersebut tidak tepat dikarenakan tidak terdapat pasar aktif atas saham dan reksadana tersebut.

Asabri diketahui tidak melakukan asesmen atas perhitungan wajar saham dan reksadana tersebut dengan kondisi apabila tidak ada pasar aktif. Sesuai dengan PSAK 68 tentang Pengukuran Nilai Wajar, asesmen tersebut antara lain dengan cara melakukan penjualan efek-efek tersebut dengan proporsi yang cukup, memperoleh informasi penjualan efek-efek identik yang dimiliki oleh perusahaan lain yang sejenis, atau melakukan penilaian/valuasi atas efek-efek tersebut.

Penyajian nilai harga pasar aset investasi saham dan reksadana yang belum dapat diyakini kewajaran ter-

sebut berdampak pada kewajaran penyajian pendapatan (rugi) hasil investasi AIP yang pada akhirnya menjadi penambah/pengurang saldo AIP Asabri tahun 2018.

Permasalahan lainnya, Asabri pada 2019 tidak melakukan perubahan signifikan atas kepemilikan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang bersumber dari AIP tahun 2018. Penyajian rugi investasi dari penurunan harga saham dan reksadana tahun 2019 menggunakan pengukuran yang sama, yaitu dengan indeks harga saham pada Bursa Efek Indonesia dan perubahan nilai aktiva bersih reksadana sepanjang tahun 2019.

Dengan demikian, pengukuran kerugian dari penurunan nilai aset saham dan reksadana tersebut juga tidak dapat diyakini kewajarannya yang berdampak juga pada kewajaran nilai AIP PT Asabri (Persero) yang mengalami penurunan sebesar Rp7,52 triliun.

Dalam pernyataan opini LK Asabri tahun 2018 (Audited), KAP juga menyatakan bahwa tidak terdapat pengaturan secara khusus siapa yang akan menanggung kerugian bilamana terdapat penurunan nilai yang signifikan atas nilai investasi dari AIP. Dengan demikian terdapat ketidakpastian yang material apakah dampak penurunan tersebut akan dibebankan langsung pada AIP atau diakui pada laporan laba rugi Perseroan. Akibatnya, KAP tidak dapat menentukan elemen apa saja dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan ekuitas yang memerlukan penyesuaian sebagai dampak dari hal tersebut.

Penyebab penurunan nilai aset investasi saham dan reksadana Asabri tersebut telah diungkap pada LHP Kinerja atas Efektivitas Program Pensiun PNS, TNI, dan Polri untuk Menjamin Perlindungan Kesenambungan Penghasilan Hari Tua Tahun 2018-Semester I Tahun 2019 Nomor 130/LHP/XV/12/2019 tanggal 31 Desember 2019. LHP tersebut mengungkapkan terdapat penempatan saham yang

tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian pada PT Asabri (Persero).

Dari analisis fundamental dan risiko investasi atas uji petik enam saham yang dilakukan penempatan investasi, Asabri diketahui tidak sepenuhnya memenuhi prinsip kehati-hatian. Terdapat lima emiten mengalami rugi bersih. Selain itu terdapat beberapa emiten yang kegiatan operasionalnya sangat dipengaruhi perubahan kurs mata uang asing serta harga sahamnya sudah cukup tinggi (*overvalued*).

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar meminta Direktur PT Asabri (Persero) membuat *action plan* dan tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja investasi saham pada PT Asabri (Persero) yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian dan sudah mengalami penurunan nilai. Belum terdapat tindak lanjut atas rekomendasi tersebut.

Berdasarkan PP Nomor 102 Tahun 2015 dan PMK Nomor 174/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan AIP Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI sebagaimana diubah terakhir dengan PMK Nomor 147/PMK.02/2018, AIP dapat digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, biaya operasional pembayaran manfaat pensiun dan biaya pengembangan investasi.

Namun, kerugian pengelolaan investasi seperti penurunan nilai investasi dari saham dan reksadana tidak diatur oleh pemerintah untuk dapat langsung dibebankan biayanya pada AIP. Dengan demikian pembebanan penurunan nilai investasi pada AIP Asabri tahun 2019 belum memiliki dasar hukum dan belum diukur secara akurat. Dalam rangka kewajaran penyajian penurunan nilai tersebut, Dewan Komisaris PT Asabri (Persero) melalui surat nomor B/064/KOM/AS/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 telah menunjuk dan menugaskan KAP untuk melakukan audit LK PT Asabri (Persero) Tahun 2019. ●

Penyaluran Dana Sawit BERMASALAH



Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan terdapat pekebun memiliki bidang usaha yang tidak terkait dengan perkebunan kelapa sawit.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya sejumlah permasalahan dalam penyaluran dana bantuan peremajaan perkebunan kelapa sawit (PPKS). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas penyaluran dana PPKS tahun 2016-2019, pengelolaan belanja barang berupa bantuan dana untuk peremajaan perkebunan kelapa sawit pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan.

BPDPKS merupakan salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengelola dana hasil pungutan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya untuk digunakan membiayai ke-

giatan-kegiatan tertentu seperti PPKS. Kegiatan PPKS dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit dan menjaga luasan lahan perkebunan kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selama tahun 2016-2019, BPDPKS telah menyalurkan dana PPKS sebesar Rp2,66 triliun melalui 15 bank mitra kepada 47.303 rekening pekebun rakyat yang tergabung dalam 539 kelompok tani (poktan) melalui 15 bank mitra. Dalam perjanjian kerja sama antara poktan, bank mitra dan BPDPKS disebutkan bahwa dana PPKS hanya diperuntukkan bagi kegiatan PPKS dengan jangka waktu perjanjian bervariasi antara dua sampai dengan lima tahun, sedangkan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan PPKS dilakukan

oleh masing-masing koordinator poktan dengan cara terlebih dahulu memindahbukukan dana pada masing-masing rekening pekebun yang menjadi anggota ke rekening poktan pada bank mitra.

Ada empat permasalahan yang ditemukan BPK. Pertama, pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya memiliki identitas yang valid. Hasil reviu atas pedoman peremajaan tanaman kelapa sawit pekebun dalam kerangka pendanaan BDPDKS yang diterbitkan oleh Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan belum ada mekanisme verifikasi atas validitas identitas pekebun penerima dana PPKS.

Permasalahan kedua, BDPDKS tidak melakukan analisis mengenai profil pekebun dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan terdapat pekebun memiliki bidang usaha yang tidak terkait dengan perkebunan kelapa sawit serta terdapat pekebun merupakan kategori pekebun dengan skala usaha besar, yaitu memiliki pinjaman berkisar antara Rp300 juta hingga Rp7,5 miliar.

Ketiga, terdapat penggunaan dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan dan atas dana yang sudah dipertanggungjawabkan tidak dapat diidentifikasi pekebun dan kebun kelapa sawit yang telah diremajakan. Pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS yang disampaikan pihak BDPDKS menunjukkan bahwa bukti pertanggung-



jawaban yang ada tidak mengidentifikasi secara jelas lahan pekebun yang dikerjakan atau yang dilakukan aktivitas pekerjaan peremajaan kelapa sawit.

Adapun permasalahan terakhir adalah BDPDKS tidak melakukan monitoring dan evaluasi yang memadai terhadap lambatnya penyerapan dana dan permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam kegiatan PPKS. Hasil pemeriksaan menunjukkan dari Rp2,66 triliun dana PPKS yang disalurkan, masih terdapat sisa dana per 31 Desember 2019 sebesar Rp1,84 triliun yang mengendap pada rekening poktan dan rekening pekebun belum disalurkan untuk kegiatan peremajaan kelapa sawit.

Sejumlah permasalahan tersebut terjadi karena BDPDKS belum memiliki mekanisme koordinasi dengan pihak terkait (Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan bank mitra) dalam rangka menilai kelayakan pekebun penerima dana PPKS dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan, pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKS.

BDPDKS menyatakan bakal meningkatkan monitoring penyaluran dan penggunaan dana sesuai PMK 84/2017, Permentan 7/2019, dan Perdirut BDPDKS Nomor 7 Tahun 2019 dengan mewajibkan penyampaian laporan posisi dana PPKS berdasarkan laporan bank mitra dan kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya. Sesuai Perdirut BDPDKS nomor 7, kewajiban bank mitra dan poktan/Gapoktan/koperasi/kelembagaan ekonomi pekebun lainnya untuk menyampaikan laporan telah diatur juga dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, BDPDKS akan mengoptimalkan penggunaan Aplikasi PSR (Perkebunan Sawit Rakyat) Online sejak tahap verifikasi sampai dengan penggunaan dana secara tertib, merekonsiliasi progress fisik dengan progres keuangan, berkoordinasi dengan Ditjen Perkebunan terkait verifikasi kebenaran identitas berupa NIK, dan verifikasi luas lahan pekebun penerima dana PPKS. ●

Rekomendasi BPK

- Menyusun mekanisme koordinasi dengan pihak terkait (Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dan bank mitra) dalam rangka menilai kelayakan Pekebun penerima dana PPKS dan kebun kelapa sawit yang akan diremajakan, pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPKS.
- Melaksanakan monitoring secara periodik atas perkembangan realisasi penarikan dana PPKS dari rekening poktan dan pekebun, dan memastikan dana tersebut terserap untuk kegiatan PPKS dalam jangka waktu sesuai perjanjian.
- Bekerja sama dengan bank mitra dan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian untuk melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban penggunaan dana PPKS, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika ditemukan ketidaktepatan penggunaan dana.

p-ISSN 2460-3937
e-ISSN 2549-452X



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Auditors, researchers, academics, governance and accountability of state finances experts are **invited** to contribute their papers to

Jurnal
Tata Kelola & Akuntabilitas
Keuangan Negara

JAN - JUN EDITION
deadline MARCH 31

JUL - DEC EDITION
deadline SEPTEMBER 30

Articles should NEVER be published before and shall be written in ENGLISH.
Articles are submitted to **jurnal.bpk.go.id** and follow the applied provisions.

Call for Papers

Indexed by:



SINTA-2
ACCREDITED BY RISTEK
DIKTI NO. 21/E/KPT/2018

**Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas
Keuangan Negara**
Direktorat Litbang BPK RI
telp: 021-25549000, ext.3311/3296
Hp: 0812 9522 1300
website: jurnal.bpk.go.id
e-mail: jurnal@bpk.go.id

Focuses on issues:
Public sector accounting; Auditing;
Management and governance of state finances;
Accountability of state finances;
Public administration/policy related to
state finances; State finance law.



Asa Pemulihan Pertumbuhan Ekonomi

Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2021 dan nota keuangan di hadapan anggota legislatif pada Jumat (14/8). Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan sejumlah asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam RAPBN 2021. Dalam asumsi tersebut, Presiden menekankan, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat bergerak positif seiring dengan perbaikan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Jokowi menyampaikan, asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok tumbuh 4,5 persen sampai 5,5 persen. Sementara angka inflasi dipatok tetap terjaga di level 3 persen. Angka ini diyakini mampu mendukung daya beli masyarakat dan menaikkan konsumsi. Kemudian, kurs rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp14.600 per dolar AS.

Asumsi makro berikutnya, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan bergerak di level 7,29 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) juga dipatok di angka 45 dolar AS per barel, sejalan dengan target *lifting* minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 705 ribu barel dan

1.007.000 barel setara minyak per hari.

Terkait tingkat defisit dalam RAPBN 2021, angkanya dipatok sebesar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun. "Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau Rp1.039,2 triliun," kata Jokowi.

Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun ini membuat pemerintah memutuskan memperlebar defisit APBN di atas 3 persen selama tiga tahun mendatang.

"Pelebaran defisit dilakukan mengingat kebutuhan belanja negara untuk penanganan kesehatan dan perekonomian meningkat pada saat pendapatan negara mengalami penurunan," ujar Jokowi.

Jokowi menjelaskan, rencana pendapatan negara dipatok di angka Rp1.776,4 triliun dan belanjanya di angka Rp2.747,5 triliun. Menyiasati defisit anggaran sebesar Rp971,2 triliun tersebut, Jokowi memastikan pembiayaannya akan dikelola dengan hati-hati.

"Defisit anggaran 2021 dibiayai dengan memanfaatkan sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati," jelas Presiden.

Jokowi juga menekankan, pembiayaan utang akan dilakukan secara responsif guna mendukung pemulihan ekonomi dan sosial. Pembiayaan defisit, ujar Jokowi, akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin moneter.

“Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga pemerintah secara konsisten,” ujar Jokowi menjelaskan.

Untuk tahun depan, pemerintah memprioritaskan anggaran kesehatan sebesar Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN. Alokasinya akan dialirkan untuk dukungan pengadaan vaksin, peningkatan nutrisi ibu hamil-menyusui dan balita, penanganan penyakit menular, serta penurunan *stunting*.

Sementara untuk anggaran pendidikan 2021 nanti, dialokasikan sebesar Rp549,5 triliun atau 20 persen dari APBN sesuai ketentuan yang ada. Fokus penganggaran untuk sektor pendidikan adalah peningkatan SDM, peningkatan kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0.

“Pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, dan kemitraan daerah serta masyarakat sipil,” ujar Jokowi.

Anggaran pendidikan juga akan dimanfaatkan untuk penguatan PAUD, peningkatan efektivitas bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP), dan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4,5 persen hingga 5,5 persen. Tidak hanya faktor domestik, pencapaian target ini juga bergantung pada situasi global. “Kita tentu dipengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang mungkin pada kuartal ketiga akan muncul banyak revisi proyeksi dari lembaga internasional,” tutur Sri.

Dengan ketidakpastian tersebut, Sri memastikan, pemerintah terus menggunakan instrumen kebijakan yang dimiliki secara maksimal. Koordinasi antara fiskal dengan moneter terus dijaga untuk menciptakan situasi kondusif pada pertumbuhan dan pemulihan ekonomi.

Skema berbagi beban (*burden sharing*) antara otoritas fiskal dengan moneter tetap dilanjutkan pada tahun depan. Sri menekankan, kebijakan ini dijalankan dengan tetap menjaga kredibilitas dan penuh kehati-hatian.

Reformasi melalui *Omnibus Law* juga menjadi fokus utama pemerintah. Sri mengatakan, penyelesaian regulasi ini akan menciptakan kepercayaan diri dunia terhadap Indonesia, sehingga mampu menarik arus modal ke dalam negeri sekaligus mengurangi volatilitas nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tetap menjaga inflasi di kisaran tiga persen, terutama untuk *volatile food* dan inflasi dari produk yang dijaga pemerintah. Sri mengatakan, fokus ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi,

yakni memprioritaskan anggaran ketahanan pangan.

Terkait tingkat defisit, Sri menjelaskan, pelebaran tersebut dilakukan karena pemerintah melihat ketidakpastian yang masih berlangsung akibat pandemi Covid-19 sampai tahun depan. Dampaknya, belanja pemerintah terus ditingkatkan, sedangkan pendapatan berpotensi terus mengalami tekanan.

“Oleh karena itu, kebutuhan pemulihan dan ekspansi fiskal untuk mendorong pemulihan masih dirasakan penting,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, Sri mengatakan, pemerintah masih terus fokus untuk memberikan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, target pertumbuhan penerimaan negara memang dibuat tidak terlalu tinggi, yakni dari Rp1.699 triliun pada tahun ini menjadi Rp1.776 triliun pada tahun depan, atau naik sekitar tiga persen.

Di sisi lain, belanja untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi terus dilakukan. Khususnya dalam mendorong daya beli masyarakat paling rendah melalui pemberian bantuan sosial. Akses untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi melalui subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga terus dilakukan. Selain itu, Sri menambahkan, dukungan program ke sektor terdampak seperti pangan dan pariwisata turut menjadi prioritas pemerintah tahun depan. ●





■ Sri Mulyani Indrawati

Program Pemulihan Terus Berlanjut

Pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan anggaran dijalankan dalam kondisi tidak biasa. Namun, kecepatan pelaksanaan anggaran sangat dituntut untuk bisa menjaga pelayanan kesehatan dan mendorong pemulihan ekonomi.

”

Jadi kita melakukan konsolidasi secara bertahap dari sisi APBN-nya. Namun, kita tetap harus mendukung karena pemulihan ekonomi masih harus dibantu.

Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021 dan nota keuangan kepada parlemen pada Agustus lalu. Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2021 adalah memulihkan ekonomi dan memperkuat reformasi.

Sri mengatakan, pemerintah masih akan berupaya menangani dampak pandemi Covid-19 baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial. Pemerintah pun masih menganggarkan dana pemulihan ekonomi sebesar Rp356 triliun pada 2021. Meski, angka tersebut sudah mengecil dibandingkan anggaran pemulihan ekonomi 2020 yang mencapai Rp695 triliun.

“Jadi bagaimana kita bisa mendukung terutama untuk bidang bantuan sosial, untuk membantu UMKM, mendorong kegiatan sektoral, kemudian regional pemerintah daerah, dan juga

untuk dunia usaha. Itu kita tuangkan di dalam postur 2021,” kata Menkeu dalam wawancara dengan *Warta Pemeriksa*.

Meski dalam suasana pandemi, Sri menekankan, upaya pembangunan untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi tetap berlanjut. Sri menyampaikan, permasalahan struktural seperti kualitas sumber daya manusia diterjemahkan dalam bentuk kebijakan. Kemudian, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial tetap masuk prioritas.

Reformasi pendidikan, ujar Sri, akan ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terutama dari cara mengajar dan kurikulum. Di bidang kesehatan, pemerintah juga akan meningkatkan alokasi anggaran dari yang sebelumnya sekitar 5 persen dari APBN menjadi sekitar 6 persen dari APBN. “Hal ini untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mendeteksi secara lebih dini dan memperkuat layanan kesehatan kita,” ujar Sri.

Sektor bantuan sosial juga akan terus direformasi terutama dengan peningkatan akurasi data masyarakat miskin. Pemerintah pun akan melindungi kelompok tidak mampu dengan sejumlah program subsidi maupun bantuan sosial.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah menetapkan tingkat defisit sebesar 5,5 persen dari PDB atau sebesar Rp 971,2 triliun. Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran 2020 yang mencapai 6,34 persen dari PDB atau Rp 1.039,2 triliun.

Pendapatan negara diperkirakan akan mencapai Rp 1.776,4 triliun dengan pagu belanja mencapai Rp 2.747,5 triliun. Menkeu menyampaikan, pemerintah akan mendukung geliat ekonomi dengan kebijakan fiskal ekspansif namun tetap konsolidatif.

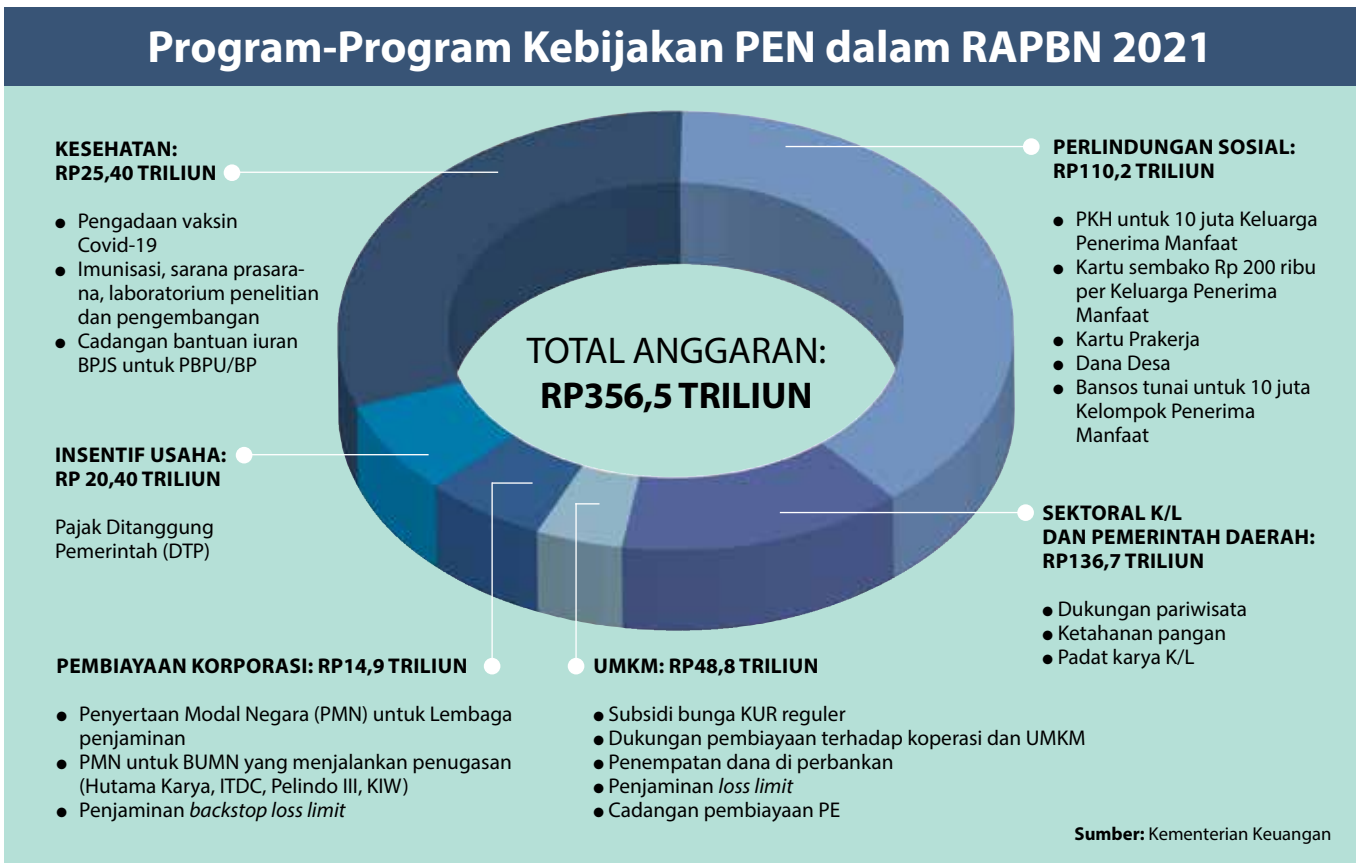
Sri menjelaskan, kebijakan ekspansif dibutuhkan guna mendorong perekonomian. Hal itu tecermin dari tingkat defisit yang diperlebar dari batas 3 persen terhadap PDB menjadi 5,5 persen terhadap PDB. Namun, pemerintah juga berupaya konsolidatif yang ditunjukkan dengan tingkat defisit yang mulai turun dari 2020.

“Jadi kita melakukan konsolidasi secara bertahap dari sisi APBN-nya. Namun, kita tetap harus mendukung karena pemulihan ekonomi masih harus dibantu,” kata Sri.

Untuk menambal defisit, pemerintah akan menerapkan strategi pembiayaan yang *prudent*. Sri menekankan, salah satu hal penting dalam pengelolaan pembiayaan dan risiko di Kemenkeu adalah transparansi. Sri menambahkan, Kemenkeu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang independen dan bisa melihat semua hal dalam pengelolaan keuangan negara. “Tidak ada yang ditutup-tutupi dan itu merupakan suatu praktik tata kelola yang baik,” kata Sri.

Terkait dengan proses penyerapan anggaran, Sri berharap BPK bisa melakukan pemeriksaan dengan memahami konteks yang dihadapi dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurut Sri, pandemi Covid-19 membuat pelaksanaan anggaran dijalankan dalam kondisi tidak biasa. Namun, kecepatan pelaksanaan anggaran sangat dituntut untuk bisa menjaga pelayanan kesehatan dan mendorong pemulihan ekonomi.

“Pada akhirnya, kerja sama dengan institusi dan aparat penegak hukum itu semua menjadi penting supaya niat yang baik dan keinginan untuk membantu rakyat di masa sulit itu tidak boleh kemudian berkompromi dengan kecerobohan, keteledoran, atau bahkan dari sisi korupsi, atau konflik kepentingan. Nah ini yang terus dilakukan,” ungkap Sri. ●



Perbaiki Pengelolaan Dana Pendidikan

Perencanaan dan penganggaran dana pengembangan pendidikan nasional, program beasiswa pendidikan Indonesia, dan program riset inovatif produktif oleh LPDP belum didasarkan kebijakan tata kelola dan penetapan target yang jelas.

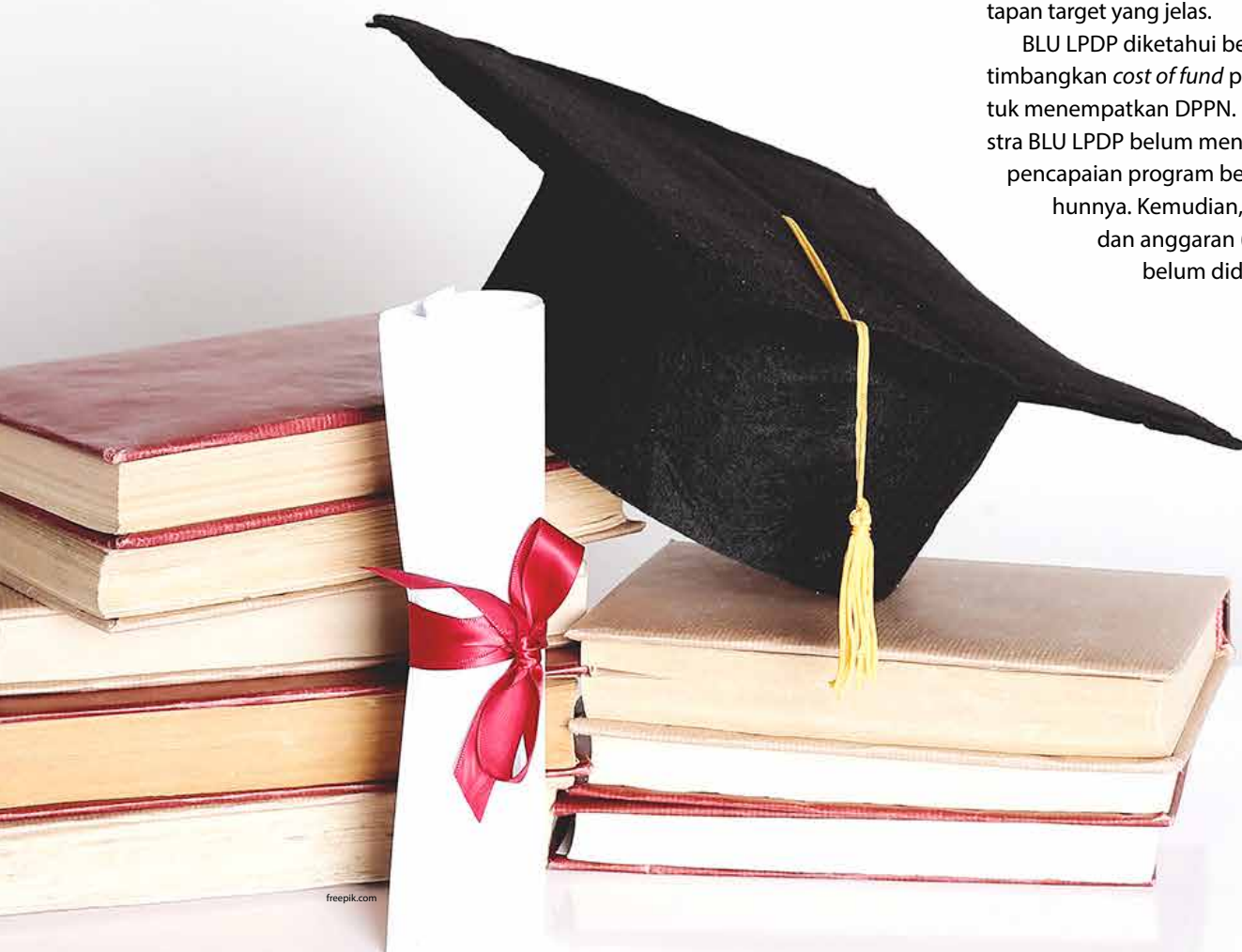
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki komitmen kuat dalam mengawal kemajuan sektor pendidikan di Indonesia. Komitmen itu diwujudkan dengan memasukkan sektor pendidikan sebagai salah satu dari 12 tema pemeriksaan BPK.

Pemeriksaan bidang pendidikan tak hanya dilakukan terhadap kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah, tetapi juga kepada badan layanan umum (BLU). Pada semester II 2019, misalnya, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana pengembangan

pendidikan Nasional (DPPN), Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI), dan Program Riset Inovatif Produktif (RISPRO) tahun 2017-semester I 2019 pada BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan instansi terkait lainnya.

Dari hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan DPPN, Program BPI, dan Program RISPRO oleh BLU LPDP kurang efektif dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta *monitoring* dan evaluasi. Hal itu dikarenakan perencanaan dan penganggaran DPPN, program BPI, dan RISPRO belum didasarkan kebijakan tata kelola dan penetapan target yang jelas.

BLU LPDP diketahui belum mempertimbangkan *cost of fund* pemerintah untuk menempatkan DPPN. Selain itu, Renstra BLU LPDP belum menetapkan target pencapaian program beasiswa per tahunnya. Kemudian, rencana bisnis dan anggaran (RBA) BLU LPDP belum didukung dengan



freepik.com

dasar perhitungan dan prioritas yang jelas, serta Program BPI dan RISPRO yang dikelola LPDP belum menjadi bagian dari RPJMN 2015–2019.

Sejumlah kekurangan itu mengakibatkan pengelolaan DPPN belum berdampak pada peningkatan kas pemerintah dan dapat mengurangi ekuitas pemerintah. Dampak lainnya, program BPI belum memiliki arah pencapaian yang jelas dan terukur serta belum jelas keterkaitannya dengan pencapaian program-program pemerintah yang termuat dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, program RISPRO oleh BLU LPDP belum sepenuhnya mendukung program riset nasional yang ditetapkan pemerintah.

Hal lain yang membuat pengelolaan DPPN kurang efektif karena belum didukung dengan prosedur penempatan dana yang dapat menjamin diperolehnya hasil yang menguntungkan bagi BLU LPDP. Hal tersebut dapat dilihat dari BLU LPDP yang belum melakukan penambahan pokok DPPN baik dari PNBP maupun sektor swasta sesuai dengan kebi-

jakan Dewan Penyantun. Selain itu, BLU LPDP belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan penempatan dana pada instrumen deposito untuk mengoptimalkan hasil yang diperoleh dengan tetap memperhatikan tingkat risiko yang terkendali. Demikian juga kebijakan penempatan dana deposito yang belum didukung dengan dokumen kajian atau analisis.

Akibatnya, BLU LPDP belum memperoleh hasil penempatan dana yang paling menguntungkan dengan tetap memperhatikan risiko penempatan dana pada masing-masing bank.

Pengelolaan alumni dan dana penelitian

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK juga menemukan bahwa BLU LPDP tidak memiliki data akurat dalam melakukan pengelolaan alumni beasiswa LPDP. BLU LPDP tidak mengetahui secara pasti jumlah keseluruhan alumni penerima beasiswa BLU LPDP dan belum mengenakan sanksi kepada alumni yang tidak memenuhi kewajiban kembali dan berkontribusi di Indonesia.

Kegiatan pengelolaan alumni yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Utama (Perdirut) Nomor PER-9/LPDP/2016 juga belum seluruhnya dilakukan. Akibatnya, tujuan pengelolaan alumni tidak tercapai.

Sementara terkait dana penelitian, LPDP dalam program yang dijalankan memberikan dana bantuan penelitian tesis/disertasi kepada *awardee* dalam rangka menyelesaikan tesis/disertasi. Dana bantuan tersebut dibayarkan satu kali secara *at cost* selama masa studi sesuai dengan proposal dan rencana anggaran yang disetujui oleh BLU LPDP dengan besaran maksimal sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Setelah penelitian selesai, *awardee* diwajibkan memberikan laporan penggunaan dana dan bukti pengembalian dana jika terdapat sisa dana ke rekening BLU LPDP melalui email BLU LPDP. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat dana bantuan tesis/disertasi yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp123,80 miliar. Akibatnya, penggunaan dana penelitian tesis dan disertasi berpotensi disalahgunakan. ●

Rekomendasi BPK kepada Direktur Utama LPDP

1. Terkait perencanaan:

- Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menetapkan strategi pengelolaan DPPN yang memadai dengan mempertimbangkan perolehan hasil yang optimal bagi BLU LPDP tanpa mengesampingkan upaya peningkatan ekuitas pemerintah.
- Menetapkan formulasi penetapan prioritas dan target pemberian beasiswa per tahunnya dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengintegrasikan program BPI yang dikelola BLU LPDP dengan program terkait pada RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- Menetapkan parameter besaran alokasi anggaran dana riset yang memperhatikan tujuan dan sasaran program riset nasional yang ditetapkan pemerintah.

2. Melakukan evaluasi terhadap SOP tentang proses penempatan dana LPDP dalam bentuk deposito dalam rangka mengoptimalkan hasil DPPN dan menetapkan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

3. Menetapkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan kewajiban *awardee* setelah lulus serta pengenaan sanksi kepada *awardee* yang tidak memenuhi kewajiban.

4. Meminta *awardee* untuk mempertanggungjawabkan dana bantuan penelitian tesis/disertasi.

5. Menetapkan mekanisme *monitoring* dan evaluasi atas *awardee* dengan status *on going* untuk mengidentifikasi pelanggaran yang berpotensi menghambat penyelesaian perkuliahan yang bersangkutan dan penyelesaian tindak lanjut atas pelanggaran tersebut.



Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana pendidikan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 10 permasalahan, terdiri dari 8 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan kerugian, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan.

LPDP: Kami Gerak Cepat Selesaikan Rekomendasi BPK

LPDP menargetkan sebanyak 14 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selesai pada tahun ini.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan, menyatakan fokus kepada upaya penyelesaian rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Khususnya rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2019.

Direktur Utama LPDP Rionald Silaban menyatakan, ada 18 rekomendasi BPK dari hasil pemeriksaan kinerja lembaganya pada 2019. Pihaknya pun langsung bergerak cepat menyelesaikan rekomendasi dan melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) untuk membahas status rekomendasi tersebut.

Rionald mengatakan, setidaknya ada 14 rekomendasi yang akan diselesaikan maksimal di akhir 2020. "Satu rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti pada Juli 2020 serta lima sudah diselesaikan pada bulan Agustus 2020 di tingkat internal. Hanya saja untuk dikatakan tuntas ada di pihak BPK dan rencananya akan dibahas di bulan Desember 2020," ucap dia kepada *Warta Pemeriksa*, Selasa (15/9).

Sedangkan untuk rekomendasi yang bernilai uang, kata dia, yaitu berupa rekomendasi penagihan dengan total mencapai Rp2,8 miliar. Dari total angka tersebut, setidaknya Rp1,2 miliar telah diterima pengembaliannya oleh LPDP. "Kami akan tetap melakukan penagihan sesuai dengan Perdirut," ucap dia.

Terkait rekomendasi lainnya, salah satu aksi yang sedang dilaksanakan LPDP adalah mengembangkan sistem informasi layanan yang terintegrasi. Saat ini pengembangan sistem informasi tersebut telah memasuki pengembangan fase akhir dan ditargetkan akan selesai pada Semester I 2021. Sistem informasi tersebut akan mengintegrasikan perencanaan dan layanan, baik layanan pengembangan dana, beasiswa, maupun riset, dan termasuk sistem pembayaran terkait layanan-layanan dimaksud. "Kami yakin tahun depan akan bouncing permintaan, karena rekomendasi kami tahun ini tidak ada yang berangkat ke luar negeri. Dengan adanya sistem ini, kami bisa mengetahui perencanaan dan pelayanan, sehingga biaya yang dibutuhkan serta siapa yang berangkat dapat diketahui datanya," ucap dia.

Sebagai informasi, BPK telah melakukan pemeriksaan

kinerja atas efektivitas pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN), Program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dan program Riset Inovatif Produktif (RISPRO) 2017 semester I 2019. BPK menilai pengelolaan DPPN belum berdampak pada peningkatan kas pemerintah dan mengurangi ekuitas pemerintah.

Terkait hal tersebut, ia menyebut sebagai lembaga negara, pihaknya tidak bisa secara langsung meningkatkan dana pengelolaan tersebut. LPDP saat ini sedang fokus pada penyusunan *governance protocol*, yaitu menyiapkan proses yang benar agar ke depannya investasi yang dilakukan LPDP dapat lebih memberikan imbal hasil yang optimal dengan tetap berpegang pada prinsip tata kelola yang baik.

Rionald mengakui pada dasarnya LPDP telah diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berinvestasi mulai tahun 2020 ini. Hanya saja pihaknya saat ini lebih fokus membuat protokol yang tepat terlebih dahulu. "Kita tak bisa langsung menanam di obligasi perusahaan ataupun saham, sebelum pihak di LPDP memahami dengan baik cara mainnya. Kita harus mengetahui dulu *the rules of the game*-nya," ujar dia.

Saat ini LPDP berinvestasi di Surat Berharga Negara (SBN) dan menempatkan dana di Bank BUKU IV karena risikonya lebih rendah. Saat ini, LPDP juga sedang menyusun kajian perluasan bank mitra agar LPDP dapat memperoleh imbal hasil yang optimal, tetapi dengan tingkat risiko yang tetap terjaga.

Rionald menambahkan, terkait program beasiswa, Pemerintah melalui LPDP terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari upaya pengembangan bonus demografi, khususnya sumber daya manusia di Indonesia. LPDP, ucap dia, juga ikut berpartisipasi mencetak pemimpin masa depan melalui pengelolaan dana abadi pendidikan, layanan beasiswa, dan layanan pendanaan riset sebagai pertanggungjawaban antargenerasi.

Hingga saat ini, beasiswa yang dikelola LPDP mencakup beasiswa umum, beasiswa targeted group, dan beasiswa afirmasi. Beasiswa umum diberikan untuk seluruh masyarakat melalui beasiswa reguler, beasiswa Perguruan Tinggi Utama Dunia, dan beasiswa dokter spesialis. Sementara, beasiswa targeted group diperuntukkan bagi PNS, TNI, Polri, dosen, dan peraih olimpiade.

"Memang dari 11.606 alumni LPDP, sekitar 47 persen adalah dari jalur reguler. Hanya saja dari tahun ke tahun jumlah beasiswa reguler semakin menurun dibandingkan targeted dan afirmasi," kata dia. ●



■ Rionald Silaban

LFAR Perkuat Nilai Tambah Laporan Pemeriksaan di Daerah

LFAR akan terus diperluas ke daerah lain di Indonesia.



■ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK, Bahrullah Akbar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginisiasi *Long Form Audit Report* (LFAR) sebagai wujud implementasi ISSAI 12 tentang Value and Benefit of SAIs. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Bahrullah Akbar menyampaikan, skema pelaporan hasil pemeriksaan tersebut adalah upaya untuk memberikan nilai tambah dari pemeriksaan yang dilakukan BPK terutama untuk pemerintah daerah.

Menurut Bahrullah, berdasarkan hasil *peer review* yang dilakukan oleh SAI Polandia, alokasi audit kinerja di BPK dinilai masih kurang. Sumber daya BPK masih lebih banyak diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada semester I dan melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) pada semester II.

“Pemeriksaan laporan keuangan sudah menunjukkan perkembangan signifikan yang semakin baik ditandai dengan capaian opini WTP berbagai pemda. Sehingga, kita perlu lagi memberikan nilai tambah,” ujar Bahrullah kepada *Warta Pemeriksa*.

Bahrullah mengatakan, inisiasi LFAR di lingkungan AKN V terinspirasi dari permintaan pemeriksaan International Atomic Energy Agency (IAEA) ke BPK. Lembaga atom dunia tersebut meminta BPK tak hanya memeriksa laporan keuangan tapi juga melakukan pemeriksaan kinerja.

“Hasil pemeriksaan kinerja itu kita tambahkan dalam laporan hasil pemeriksaan sehingga laporannya menjadi panjang dan lengkap,” ujar Bahrullah.

Sebagai proyek percontohan, AKN V telah memulai implementasi LFAR dalam pemeriksaan terhadap lima pemerintah provinsi antara lain Aceh, Lampung, Banten, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.

Topik pemeriksaan kinerja di lima daerah tersebut berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing entitas. Di Provinsi Banten, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas penanggulangan bencana tahap prabencana tahun anggaran 2019 yang hasilnya belum efektif.

Di Provinsi Lampung, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemda untuk mencapai target kemantapan jalan dalam mendukung pergerakan orang dan barang tahun anggaran 2019 yang hasilnya kurang efektif.



BPK tidak memperlakukan opsi langkah yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan konservasi energi.

Di Provinsi Jawa Timur, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan tahun anggaran 2019 yang hasilnya cukup efektif. Sementara di Aceh BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dari dana otsus tahun anggaran 2019 yang hasilnya kurang efektif.

Sedangkan pemeriksaan kinerja atas pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat di DKI Jakarta hasilnya masih perlu ditingkatkan.

Bahrullah menyampaikan, LFAR akan terus diperluas ke daerah lain di Indonesia. AKN V juga sudah bersepakat dengan AKN VI yang membawahi Perwakilan BPK di wilayah timur untuk menerapkan LFAR pada tahun depan. “Saya kira ke depannya ini akan menjadi hal yang rutin dilakukan oleh BPK,” ujar Bahrullah.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta Pemut Aryo Wibowo menyampaikan, semangat LFAR adalah agar BPK bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada *stakeholder*. Manfaat itu dapat dilihat dari hasil pemeriksaan yang tepat guna dan tepat sasaran.

BPK Perwakilan DKI Jakarta pun mencoba menerapkan pola tersebut dan mengangkat isu pencemaran udara di Jakarta. Menurut Pemut, isu tersebut sudah menjadi isu lama namun terindikasi masih dikerjakan secara sektoral.

“Kita ingin mengetahui, apakah DKI Jakarta memiliki desain besar terkait pengendalian pencemaran udara. Ternyata ada kelemahan mendasar karena masing-masing unit kerja masih bekerja sendiri-sendiri,” ujar Pemut.

Dia menyampaikan, salah satu rekomendasi BPK kepada Pemprov DKI Jakarta adalah membangun peta jalan pengendalian pencemaran udara dan membentuk *leading sector*.

“Karena ini Anda seperti bermasin orkestra, musisinya bagus tapi yang satu bermain dangdut, yang satu jazz, dan yang lainnya rock. Tidak ada dirigennya dan tidak ada partiturnya,” kata Pemut.

Pemut menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan pencemaran udara. Salah satu yang diperiksa BPK adalah proses konversi bahan bakar gas sebagai upaya konservasi bahan bakar ramah lingkungan.

BPK menemukan data pemakaian gas untuk transportasi justru menurun. Penyebabnya, investasi di gas tidak menguntungkan sehingga penyediaan SPBG menjadi sangat terbatas. Selain itu, kendaraan berbasis gas juga tidak lagi didorong pemakaiannya. “Sehingga, penggunaan bahan bakar gas pun terus turun,” ujarnya.

Dalam diskusi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pemut mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berupaya melakukan lompatan langsung ke transportasi berbasis energi listrik. Terkait hal ini, Pemut mengingatkan, Pemprov DKI Jakarta untuk tetap melihat pengalaman dari implementasi kebijakan terdahulu.

“BPK tidak memperlakukan opsi langkah yang ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan konservasi energi. Tapi, perhatikan masalah yang telah ada sebelumnya karena ternyata terjadi ketidak-sinambungan,” ujarnya.

Semangat melakukan pemeriksaan kinerja tersebut, kata Pemut, akan terus dikembangkan ke depan. Dia mengatakan, BPK Perwakilan DKI Jakarta telah mengantongi dua isu pemeriksaan kinerja yang dikerjakan pada semester II tahun ini. Hal itu yakni penyediaan air bersih dan pengendalian banjir.

“Ini sudah masuk pemeriksaan pendahuluan dan direncanakan bulan depan sudah memasuki pemeriksaan terinci,” ujar Pemut.

Untuk pemeriksaan semester I tahun berikutnya, BPK Perwakilan DKI Jakarta berencana membahas pengelolaan air limbah dan kinerja penyediaan rumah bagi masyarakat miskin di Ibu Kota. ●

Presiden Puji Kerja Cepat BPK

Menurut Presiden Jokowi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019.



■ Presiden RI Joko Widodo

Presiden Joko Widodo memuji langkah cepat dan cermat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di tengah pandemi Covid-19. Khususnya dalam upaya mengawal keuangan negara.

Hal tersebut diutarakan Presiden saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Jumat, 14 Agustus 2020.

Presiden mengatakan, di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi Covid-19, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019.

BPK, kata Presiden, juga memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah. "Selain itu, BPK memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp1,39 triliun," kata Presiden.

Presiden menambahkan, tugas internal yang berat tersebut tak lantas mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional. “Juga keanggotaannya pada *Independent Audit Advisory Committee* di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Presiden.

Sebelum Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) digelar, BPK pada 20 Juli menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. LKPP juga diserahkan kepada MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP 2019. Opini tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN Tahun 2019 dalam laporan keuangan, secara material telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Opini WTP diberikan kepada LKPP Tahun 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan atas 87 LKKL dan 1 LKBUN. Dari 88 entitas yang diperiksa, sebanyak 84 LKKL dan 1 LKBUN mendapatkan opini WTP. Jumlah entitas yang laporan keuangannya mendapatkan opini WTP meningkat dibandingkan dengan 2018 yang sebanyak 82 entitas.

Sebanyak 2 LKKL mendapat opini WDP. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang sebanyak 4 LKKL. Sedangkan satu LKKL yang meraih opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada 2018, kembali meraih opini tersebut pada 2019.

Presiden dalam pidato kenegaraan juga menyatakan bersyukur dan berterima kasih atas dukungan dan kerja cepat dari pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara yang melakukan langkah-langkah *extraordinary* dalam mendukung penanganan krisis dan membajak momentum krisis untuk menjalankan strategi-strategi besar bangsa.

Presiden mengatakan, MPR dengan cepat membuat payung program baru “MPR Peduli Covid-19” serta terus melakukan sosialisasi dan aktualisasi Pancasila serta pengkajian sistem ketatanegaraan dan konstitusi. Kemudian, DPR dengan sangat responsif membahas, menyetujui dan mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk memberikan payung hukum dalam mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian, yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang untuk melandasi penundaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah.

Agenda-agenda legislasi yang lain juga tetap berjalan efektif, antara lain Pembahasan RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta RUU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Presiden menambahkan, respons cepat juga dilakukan oleh DPD terhadap permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah, mulai dari pemberdayaan ekonomi rakyat melalui BUMDes, peningkatan daya saing daerah, dan dukungan penerapan protokol kesehatan dengan menyiapkan 9 RUU usul inisiatif DPD dan beberapa agenda lain sesuai bidang tugas DPD. ●



■ Presiden RI Joko Widodo dan Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara.

AA LANYALLA MAHMUD MATTALITTI,
KETUA DPD

Prestasi BPK Jadi Pelecut

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengapresiasi kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menilai BPK mampu menyelesaikan tugas pemeriksaan keuangan negara/daerah dengan baik di tengah adanya pandemi Covid-19. Ia juga mengapresiasi BPK yang terus menancapkan kiprahnya di kancah internasional.

Pada pidato kenegaraan yang lalu, Presiden menyampaikan apresiasi kepada BPK atas kinerja di dalam dan luar negeri. Bagaimana Bapak memandang kinerja BPK selama ini?

Saya pikir sangat tepat Presiden Joko Widodo memberi apresiasi kepada BPK, mengingat di tengah pandemi Covid-19, lembaga ini masih bisa bekerja optimal, dengan menyelesaikan semua tugas dan kewenangan auditif yang menjadi tanggung jawab BPK. Sementara banyak kinerja institusi lain yang mengalami penurunan atau terhambat akibat harus *work from home*.

Apalagi BPK dengan tepat waktu memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019, dan memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp1,39 triliun.

Dan menurut catatan kami, BPK juga berhasil menjaga kinerjanya sebagai pemeriksa

eksternal pada badan-badan internasional serta sebagai anggota Independent Audit Advisory Committee di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, sebagaimana kita ketahui bersama di tahun-tahun sebelumnya BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency (IAEA) sejak 2016 sampai 2021.

Dan makin lengkap ketika BPK terpilih menjadi auditor eksternal independen pada International Anti Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. Tidak hanya itu, kami juga mendengar bahwa BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa BPK adalah salah satu lembaga negara yang terbukti profesional, serta memiliki kinerja dan prestasi yang sangat membanggakan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bagaimana Bapak melihat hubungan antara DPD dan BPK yang berjalan selama ini?

Sudah menjadi salah satu misi saya sebagai Ketua DPD RI untuk menjalin komunikasi yang baik dengan semua lembaga negara, termasuk BPK tentunya. Dan ini sudah terjalin dengan cukup baik. Tanpa menegasikan peran masing-masing lembaga.

Kami juga berharap, pertimbangan yang disampaikan DPD ke DPR terkait calon anggota BPK bisa membantu BPK mendapatkan personil dan pimpinan yang terbaik, profesio-

nal, dan berintegritas. Dengan demikian BPK akan semakin mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Tidak hanya itu, kami juga sangat mengapresiasi tugas BPK dalam pemeriksaan keuangan negara di lembaga DPD RI. Kami sangat merasakan banyaknya masukan guna perbaikan tata kelola pemerintahan, keuangan, pengendalian internal, dan kinerja DPD RI. Sebagaimana rekomendasi yang disampaikan BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan DPD RI sejak lembaga ini terbentuk.

Dan Alhamdulillah, DPD RI menjadi satu-satunya lembaga negara dengan temuan kesalahan paling sedikit. Dan itu pun hanya kesalahan administratif, bukan pidana. Dan untuk ke-14 kalinya, secara berturut-turut DPD memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Apa saja isu-isu yang menjadi perhatian bersama antara DPD dan BPK?

Beberapa waktu lalu, saat kami bertemu dengan Ketua BPK Pak Agung Firman Sampurna, dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2019, kami sampaikan bahwa DPD RI akan mendorong kemandirian fiskal daerah. Mengingat, Indikator Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) menunjukkan mayoritas pemerintah daerah belum mandiri.

Dari data BPK tahun 2019, hanya 1 dari 542 pemda di Indonesia yang memiliki indikator "sangat mandiri" yaitu Kabupaten Badung, Bali. Disusul DKI Jakarta dan Kota Bandung, Jawa Barat yang berada pada level indikator "mandiri". Sedangkan daerah yang lain masih pada level indikator "belum mandiri" dan "menuju kemandirian".

Berikutnya, saat kami bertemu dengan Anggota III BPK, Pak Achsanul Qosasi, kami juga sepakat untuk secara bersama, sesuai wilayah tugas masing-masing, untuk melakukan pengawasan atas penggunaan dana penanggulangan bencana non alam Covid-19. Karena BPK sudah mulai melakukan pemeriksaan sejak awal pada Juli lalu, hingga pemeriksaan mendalam pada Agustus kemarin. Pak Achsanul menyatakan siap mem-



■ AA Lanyalla Mahmud Mattalitti

dpd.go.id



Kami sangat merasakan banyaknya masukan guna perbaikan tata kelola pemerintahan, keuangan, pengendalian internal, dan kinerja DPD RI.

berikan hasil tersebut kepada DPD, sebagai bahan bagi DPD dalam fungsi pengawasan.

Apakah ada saran yang ingin Anda sampaikan terkait kinerja BPK selama ini?

Kami melihat bahwa BPK telah banyak melakukan berbagai pembenahan internal. BPK juga kami pandang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup mumpuni, termasuk tenaga pemeriksa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Salah satu hal positif yang juga telah turut diinisiasi BPK adalah terbentuknya Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) beberapa waktu yang lalu. Bagi kami hal ini tentunya akan sangat baik, sebagai upaya membangun sebuah konstruksi manajemen pengetahuan, dimana lembaga-lembaga negara dapat saling mengisi dan menajamkan satu dengan lainnya.

Kami juga yakin bahwa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki SDM di BPK akan sangat membantu meningkatkan kualitas SDM di lembaga negara lainnya, termasuk DPD.

Hal-hal seperti inilah yang menurut kami dapat semakin ditingkatkan, sehingga sinergitas dan kolaborasi antar lembaga negara dapat semakin kita tingkatkan bersama-sama di masa-masa mendatang.

Apakah ada kegiatan atau program-program yang digelar DPD yang melibatkan BPK ke depannya?

Hubungan baik yang telah terbangun selama ini antara DPD dan BPK adalah modal besar bagi kami. Sebagai Pimpinan Lembaga DPD RI yang didukung oleh Sekretariat Jenderal DPD RI, kami telah merumuskan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator keberhasilan DPD RI untuk 5 (lima) tahun ke depan.



Pada intinya kita bertekad untuk mewujudkan DPD RI sebagai parlemen dan senator yang kuat dan aspiratif, yang memperjuangkan kepentingan daerah dalam bingkai NKRI.

Pada intinya kita bertekad untuk mewujudkan DPD RI sebagai parlemen dan senator yang kuat dan aspiratif, yang memperjuangkan kepentingan daerah dalam bingkai NKRI. Oleh karena itu seluruh sumber daya dan tenaga akan kami maksimalkan untuk mewujudkan impian dan harapan tersebut.

Tentunya upaya tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh tata kelola keuangan, kinerja, organisasi, dan tatalaksana pemerintahan yang handal. Oleh karenanya kami selalu menekankan agar reformasi birokrasi menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal.

Kami telah memikirkan beberapa agenda

program dan kegiatan yang melibatkan BPK. Dan hal tersebut akan kami bahas dalam rapat-rapat alat kelengkapan, rapat pimpinan, hingga ke rapat paripurna.

Kami berharap DPD dan BPK akan lebih sering duduk bersama secara berkala dan mendiskusikan langkah-langkah strategis apa yang dapat kita lakukan bersama, terutama dalam mewujudkan visi dan misi DPD untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Bagaimana Bapak melihat hubungan DPD dan BPK pada masa yang akan datang?

Kami melihat hubungan antara lembaga pemeriksa keuangan (eksternal) dengan DPD bukan semata-mata sebagai hubungan yang hanya terpaku aspek tugas dan wewenang saja. Namun lebih dari itu, yakni sebagai hubungan antar lembaga negara yang saling berkaitan, saling membutuhkan, dan saling mengisi.

Saya berharap selain dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita dapat membangun komunikasi dan kerjasama yang konstruktif. Misalnya DPD akan sangat membutuhkan input dari BPK atas pelaksanaan tugas pengawasan undang-undang dan penyusunan RUU.

Selain itu DPD juga akan meminta *advice* BPK terkait pengelolaan keuangan lembaga, penguatan peran daerah dalam pembangunan, penguatan dan pendayagunaan SDM, dan lain sebagainya.

Jadi, pada intinya, ada banyak hal yang akan dilaksanakan DPD bersama BPK ke depannya.

Apa saja harapan Bapak kepada BPK?

Pertama, tentu saya berharap BPK dapat meneruskan prestasi yang telah dicapai selama ini. Karena tidak hanya untuk BPK sendiri, prestasi BPK di dalam dan luar negeri tersebut juga dapat menjadi cermin oleh lembaga-lembaga negara lain untuk semakin berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai.

Kedua, kami berharap DPD dan BPK akan semakin membangun komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi yang konstruktif dan bermanfaat untuk masing-masing lembaga, sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk BPK RI. ●

PROF MARDIASMO,
KETUA IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)

Kesempatan Emas Sentuh Masyarakat Langsung



■ Prof Mardiasmo

Bagaimana Anda melihat penerapan *audit universe* untuk anggaran pada masa pandemi?

Dari dulu, mimpi kita adalah mampu memeriksa secara keseluruhan atau kita menyebut *comprehensive audit*. *Audit universe* yang pertama ini cukup besar, jumlahnya mencapai Rp695 triliun. Dari sisi spektrum pun ini terkait dengan program pemerintah mengenai penanganan penanggulangan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Spektrum juga memandang entitas yang diaudit yang banyak. Mulai dari pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, OJK, BUMN, BUMD. Termasuk BLU pusat dan BLU di daerah, yaitu rumah sakit daerah atau TNI dan Polri. Artinya semua unsur itu ikut terlibat

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar *audit universe* (semesta pemeriksaan) terhadap penggunaan dana Covid-19. Langkah ini tak biasa mengingat bahwa pemeriksaan umumnya dilakukan sesudah tahun berjalan selesai. Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Prof Mardiasmo menjelaskan, pemeriksaan ini justru menjadi kesempatan bagi BPK untuk dapat menyentuh langsung keinginan masyarakat. Dengan begitu, BPK terbukti hadir dan tak hanya sekadar menjadi 'lembaga penghasil opini'. Berikut hasil wawancara lengkap *Warta Pemeriksa* dengan Mardiasmo, beberapa waktu lalu.

dalam penanganan Covid-19 serta PEN.

Pemeriksaan ini juga menjadi prioritas yang sangat penting dan ditunggu masyarakat luas. Kondisi saat ini berbeda dengan krisis ekonomi pada 1998 dan 2008 yang hanya menyentuh kaum elite. Saat ini, yang terjadi adalah krisis kemasyarakatan atau masalah umat. Karena saat ini justru yang kena lebih dahulu adalah UMKM, khususnya sektor mikro. Termasuk juga pekerja harian lepas atau yang mengandalkan pemasukan per hari.

Bagi saya, ini adalah sebuah momentum atau *golden opportunity* (kesempatan emas) bagi BPK untuk meningkatkan kontribusi yang selama ini sudah sangat baik. Ini juga sangat menyentuh masyarakat langsung dan hasilnya amat ditunggu. Makanya ini bisa disebut *performance audit* atau *value for money audit*.

Nanti BPK akan memberikan rekomendasi terhadap program itu. Apakah tujuan dari program yang lahir lewat perpu dengan anggaran hingga

Rp695 triliun itu. Kemudian perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya, sampai dengan pelaporan hingga pertanggungjawabannya. Ini merupakan rangkaian audit yang cukup berat makanya sungguh tepat untuk tidak menunggu sampai akhir.

Salah satu penekanan pada pemeriksaan ini adalah bahwa BPK mengawal penggunaan anggaran sejak dini. Bagaimana Bapak melihat praktik ini bisa menjadi yurisprudensi?

Umumnya, pemeriksaan BPK adalah *post audit* karena ujungnya memberikan opini. Sementara *audit universe* adalah program penanganan yang berisiko dan ditangani dengan hati-hati. Menurut saya, BPK saat ini dalam posisi tidak mendampingi, akan tetapi eksternal audit. Alasan BPK sebagai pemeriksa eksternal agar bisa memberi masukan kepada presiden sebagai kepala negara. Misalnya ada identifikasi masalah yang terjadi sehingga ada *corrective action* dan dilakukan secara simultan.

Hanya saja karena ini paralel dan anggaran Rp695 triliun, akan dilaporkan dalam bentuk LKPP. Maka BPK akan melakukan dua kali pemeriksaan, yaitu program *performance audit* dan *general audit*. Dalam laporan akhir tahun yang berbentuk LKPP TA 2020 juga akan memuat pertanggung jawaban anggaran Rp695 triliun tersebut.

Makanya ada keinginan kita untuk membuat Long Form Audit Report atau LFAR yang isinya berupa ringkasan eksekutif, LHP Laporan Keuangan, LHP Sistem Pengendalian Internal, dan LHP Kinerja program. BPK, dalam hal ini juga harus tetap menjadi auditor eksternal agar tidak mengalami *self review threat*. Makanya saya berpesan agar pemeriksaan yang lebih teknis harus ada di tangan *internal auditor*.

Apa saja kelebihan penggunaan praktik ini dan apakah ada negara lain yang memang telah menerapkan pemeriksaan sejak dini?

Saya memandang program yang kita bicarakan ini adalah program yang berisiko, yang harus cepat ditangani, *extraordinary*. BPK hadir lebih awal agar pemerintah tidak sendirian. Di sini BPK memperlihatkan sebagai bagian dari institusi negara yang melapor kepada presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintah.

Saya juga melihat praktik ini bagian dari visi misi BPK yang baru, yaitu bagaimana BPK berkontribusi bagi negara. Hanya saja perlu membedakan antara internal dan *external editor*. Hal ini agar benar saat memberikan rekomendasi.

Terkait negara lain, sebenarnya ini saya baca merupakan penerapan ISSAI 12 INTOSAI. Jadi ada 12 prinsip bagi *supreme audit institution* untuk membawa pengaruh lebih bagi masyarakat. Artinya BPK-BPK di manapun memang tidak cukup hanya memberikan opini, tetapi juga memberi nilai lebih kepada masyarakat.

Bagaimana bila pemeriksaan ini diberlakukan pada masa mendatang?

Kita memiliki *continues audit* juga. BPK juga melakukan *performance audit* di beberapa tempat. Di samping itu juga *financial audit* untuk *continuity* dan ketaatan. Kemudian ada *interim audit* dan Laporan semester I. Artinya, BPK tanpa harus mengungkapkan sudah melakukannya.

Selain itu setiap pemda juga memiliki keunikan tersendiri. Misalnya di Palu pernah ada tsunami. Kemudian Bali sebagai *international hub*. Bila BPK melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan manfaatnya, maka menurut saya sangat baik.

BPK telah mencoba melakukan beberapa pilot project untuk dapat memberikan manfaat selain pemeriksaan biasa yang dilakukan. Bagaimana Anda melihat hal tersebut?

Saya ingin mengomentari transparansi fiskal dimana Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara. Bagi saya, hal ini sangat penting. Ketika menjadi wakil menteri keuangan pun sudah saya sampaikan betapa pentingnya pemeriksaan transparansi fiskal pemerintah pusat.

Saya ingat ketika itu, salah satu *concern* BPK adalah *tax expenditure*. Seperti pemerintah memberikan pajak ditanggung pemerintah, begitu juga dengan *tax allowance* dan *tax holiday* dimana semuanya bisa disebut *tax expenditure*.

Dalam artian, sering kali disebut realisasi penerimaan pajak belum atau tidak sampai target. Padahal bila diperhitungkan dengan *tax expenditure*, bisa jadi angkanya lebih besar dari target. Karena sering kali pengurangan atau keringanan pajak diberlakukan untuk membantu UMKM.

Hal ini sepatutnya juga disampaikan ke masyarakat. Sementara pada saat yang sama BPK dapat memeriksa dan memberikan *assurance* bahwa pemberian *tax expenditure* memiliki pengaruh langsung ke masyarakat.

Terkait pemeriksaan anggaran polusi udara di Pemprov DKI Jakarta,

menurut saya sangat baik, karena kita melihat polusi ini menjadi *concern* seluruh rakyat. Sehingga amat cocok dilakukan audit terkait anggaran polusi udara. Saya malah berharap ini juga daerah lain dilakukan audit sesuai *concern* yang ada di sana.

Apalagi yang dapat dilakukan BPK untuk dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan pada masa mendatang?

BPK sudah saatnya melakukan *comprehensive audit*, yaitu *end to end*. Karena saat ini semua harus menjadi bagian pemeriksaan dan dikonsolidasikan, termasuk BLU dan BUMD di daerah. Tak hanya laporan keuangan, namun juga kinerja. Ini membutuhkan SDM, anggaran, dan infrastruktur yang luar biasa.

Sejauh mana kemandirian anggaran dapat meningkatkan upaya BPK untuk dapat memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan pada masa mendatang?

Saya selalu menyatakan anggaran BPK tak bisa hanya *based performance budgeting*, namun *activity based costing*. Artinya mana anggaran yang *supporting* dan mana anggaran yang berdasarkan aktivitas saja.

Saya menilai untuk melakukan audit itu membutuhkan banyak anggaran. Makanya sedari dulu saya tak setuju dengan anggaran perjalanan dinas. Saya menyebut BPK, BPKP, dan APIP melakukan perjalanan dinas bukan hanya untuk keluar kota saja namun untuk melakukan audit.

Makanya untuk anggaran pengambil data dan mencari sampling anggarannya jangan dibatasi. Karena bila dibatasi maka jumlah data maupun sampling yang didapat juga terbatas atau malah berkurang.

Bahkan saat melakukan penganggaran untuk audit, bila dananya dibatasi maka hasilnya tidak matang. Sementara saat melakukan audit tidak berhasil mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas. ●

Pemeriksaan Kinerja Bantu Pemda Capai Target

Anies menyatakan Pemprov DKI selalu membutuhkan asesmen BPK melalui pemeriksaan kinerja.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut baik langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat pemeriksaan kinerja. Menurut Anies, pemeriksaan kinerja dapat membantu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program yang dibuat.

Penguatan pemeriksaan kinerja oleh BPK salah satunya dilakukan melalui *Long Form Audit Report (LFAR)*. Lewat LFAR, BPK selain melakukan pemeriksaan laporan keuangan, pada periode yang sama ada tim lain yang melakukan pemeriksaan kinerja. Laporan yang dihasilkan adalah gabungan dari laporan pemeriksaan keuangan dan laporan pemeriksaan kinerja.

Dengan demikian, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga memberikan penilaian atas keberhasilan atau ketidakberhasilan instansi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

LFAR telah dijalankan Auditorat Keuangan Negara (AKN) V. Ada lima pemerintah daerah yang menjadi proyek percontohan LFAR, salah satunya adalah Pemerintah Provinsi DKI mengenai upaya pengendalian pencemaran udara.

Anies Baswedan dalam wawancara dengan *Warta Pemeriksa* pada Senin (14/9) mengatakan, Pemprov DKI selalu membutuhkan asesmen BPK melalui pemeriksaan kinerja. "Dan kita berharap dari situ kita bisa memastikan bahwa semua rencana yang kita buat, terlaksana dengan baik," kata Anies.

Anies pun mengapresiasi profesionalisme para pemeriksa BPK dalam menjalankan setiap pemeriksaan. Menurut Anies, BPK hadir dengan semangat untuk membantu pemerintah daerah mencapai semua target-target yang disepakati.

"Saya merasa teman-teman di BPK sangat kontributif. Ketika proses audit dan ada banyak temuan-temuan, temuan itu dibahas dalam suasana membangun perbaikan, membangun perubahan. Dan kami di Pemprov DKI selalu instruksikan kepada seluruh jajaran bahwa jika ada masalah di lapangan, rujuklah ke BPK terkait solusi yang dibutuhkan," kata Anies.



■ Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Terkait hasil pemeriksaan atas pengendalian pencemaran udara, Anies menyatakan Pemprov DKI menerima hasil pemeriksaan tersebut sebagai hasil yang objektif. "Kita terima sebagai fakta," ujar Anies.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi darat masih perlu ditingkatkan, terutama dengan memperhatikan empat permasalahan utama. Pertama, Pemprov DKI Jakarta belum memiliki *grand design* pengendalian pencemaran udara yang komprehensif dalam upaya perbaikan kualitas udara. BPK pun merekomendasikan dibuatnya *grand design* tersebut dengan mengakomodasi *database* dan model inventarisasi yang berkesinambungan dalam penyusunan kebijakan. Dengan begitu, aktivitas pengendalian pencemaran udara yang dilakukan bisa terpadu.

Kedua, penerapan kebijakan bahan bakar ramah lingkungan dalam upaya meningkatkan kualitas udara di DKI Jakarta belum didukung dengan rencana aksi dan target konversi ke bahan bakar ramah lingkungan. Salah satu yang

diperiksa BPK adalah proses konversi bahan bakar gas sebagai upaya konservasi bahan bakar ramah lingkungan.

Ketiga, penerapan kebijakan uji emisi kendaraan bermotor belum optimal dalam upaya meningkatkan kualitas udara di DKI Jakarta. Dan yang terakhir, penerapan sistem transportasi publik yang terintegrasi serta manajemen rekayasa lalu lintas belum optimal dalam mendukung penurunan pencemaran udara di DKI Jakarta. Dalam hal ini, sistem transportasi publik yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Pola manajemen rekayasa lalu lintas juga belum optimal dalam mendukung pola perjalanan dan pengendalian pencemaran udara.

Anies mengatakan, peta jalan pengendalian polusi udara terus disusun oleh DKI Jakarta bersama kementerian terkait dengan pemerintah daerah tetangga. Ia menjelaskan, peta jalan pengendalian polusi harus menjadi peta jalan bersama karena polusi tidak mengenal batas wilayah. "Seperti kita ketahui, polusi itu tidak pernah permissi untuk masuk ke Jakarta, begitu juga tidak permissi untuk keluar dari wilayah. Jadi, harus dikerjakan lintas wilayah," ujar dia.

Mengenai program bahan bakar lingkungan, yaitu penggunaan bahan bakar gas, Anies menyebut Pemprov DKI ingin lebih mengoptimalkan tenaga listrik untuk kendaraan.

"Menurut saya dalam menjalankan hal ini, kita harus punya *blue print* yang lebih jangka panjang. Dalam jangka panjang, penggunaan energi listrik itu adalah yang paling efisien. Investasi awal memang mahal, tetapi dalam jangka panjang akan menguntungkan."

Dalam hal integrasi transportasi umum, kata Anies, DKI membangun program bernama Jak Lingko. Jak Lingko mengintegrasikan kereta api, MRT, LRT, Bus Rapid Transit (BRT), dan angkutan umum biasa. Anies mengatakan, di beberapa stasiun, penumpang bisa langsung melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta ke tempat tujuan. "Nanti harapannya semua stasiun di Jakarta tersambungkan," ucap Anies.

Anies mengungkapkan, kendaraan umum di Ibu Kota saat ini baru menjangkau 23 persen wilayah. Anies ingin meningkatkan jangkauan tersebut hingga 95 persen. Ia menjelaskan, jangkauan 95 persen itu berarti di semua wilayah Jakarta, dalam jarak 500 meter masyarakat dapat menemukan tempat pemberhentian kendaraan umum.

"Jadi misalnya kita ada di kantor BPK, kita hanya perlu jalan kaki 500 meter untuk menuju halte. Itu yang akan membut orang mau menggunakan kendaraan umum. Tapi, kalau ingin naik kendaraan umum orang harus berjalan hingga 2 km, ya langsung telepon taksi, langsung telepon ojek, atau naik mobil sendiri." ●

Langkah Pengendalian Kualitas Udara di DKI

1

Memastikan tidak ada angkutan umum yang berusia di atas sepuluh tahun dan tidak lulus uji emisi beroperasi di jalan serta menyelesaikan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko pada tahun 2020.

2

Mendorong partisipasi warga dalam pengendalian kualitas udara melalui perluasan kebijakan ganjil genap dan peningkatan tarif parkir di wilayah yang terlayani angkutan umum massal mulai pada tahun 2019, serta penerapan kebijakan *congestion pricing* yang dikaitkan pada pengendalian kualitas udara pada tahun 2021.

3

Memperketat ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan pribadi mulai tahun 2019 dan memastikan tidak ada kendaraan pribadi berusia lebih dari 10 tahun yang dapat beroperasi di wilayah DKI Jakarta pada 2025.

4

Mendorong peralihan ke moda transportasi umum dan meningkatkan kenyamanan berjalan kaki melalui percepatan pembangunan fasilitas pejalan kaki di 25 ruas jalan protokol, arteri dan penghubung ke angkutan umum massal pada tahun 2020.

5

Memperketat pengendalian terhadap sumber penghasil polutan tidak bergerak khususnya pada cerobong industri aktif yang menghasilkan polutan melebihi nilai maksimum baku mutu emisi.

6

Mengoptimalkan penghijauan pada sarana dan prasarana publik dengan mengadakan tanaman berdaya serap polutan tinggi serta mendorong adopsi prinsip *green building* oleh seluruh gedung.

7

Merintis peralihan ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan menginstalasi *solar panel rooftop* pada seluruh gedung sekolah, gedung pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Sumber: Instruksi Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kualitas Udara



Segera Hadir!



Kami membangun
Warta Pemeriksa Digital
untuk lebih mudah dan cepat
dalam menjangkau Anda.
Nantikan segera
pengalaman baru dan berbeda
saat membaca Warta Pemeriksa.

Menguji Konsistensi DJP Terhadap Wajib Pajak

Dalam proses pemeriksaan dan *sampling* yang diambil, fokus BPK adalah pada konsistensi dari petugas pajak kepada wajib pajak berdasarkan aturan yang ada.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki mandat untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK tak hanya mengawal penggunaan uang negara, tapi juga penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak.

Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Laode Nusriadi mengatakan, sistem pajak pada dasarnya menganut *self assesment*, yakni wajib pajak (WP) menghitung dan melaporkan sendiri kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki data profil sejauh mana WP individu atau badan mengikuti aturan yang berlaku.

"Karena WP itu bisa dibuat profil, misalnya DJP itu mengetahui profil WP yang salah hitung ataupun tidak patuh. BPK mempelajari data yang dibuat oleh DJP dan secara *sampling* melihat hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas pajak," kata Laode.

Dia menjelaskan, dalam pemeriksaan dan *sampling* yang diambil oleh BPK, fokus BPK adalah pada konsistensi dari petugas pajak kepada WP berdasarkan aturan yang ada. Sebelum BPK melakukan pemeriksaan, akan ditentukan dahulu sektor usaha yang akan diperiksa, misalnya sektor usaha kelapa sawit atau batu bara. Penentuan sektor usaha yang akan menjadi *sampling* pemeriksaan dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain isu yang berkembang di masyarakat atau analisis kenaikan



■ Laode Nusriadi

atau penurunan penerimaan pajak pada sektor usaha tertentu. Setelah ditentukan sektor usaha yang akan diperiksa sebagai *sampling*, kemudian ditentukan Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, dan WP terkait berdasarkan data hasil pemeriksaan pajak yang sebelumnya telah dilakukan petugas pajak. Selanjutnya BPK akan melihat apakah terdapat perlakuan yang sama untuk hal yang sama terhadap masing-masing WP tersebut antar kantor pelayanan pajak dengan memperhatikan aturan yang ada. "Dengan kata lain, BPK melihat konsistensi perlakuan petugas pajak kepada WP," ucap Laode

"Misalnya WP ini melanggar suatu ketentuan, lalu wajib pajak lain melanggar ketentuan yang sama, BPK melihat apakah perlakuannya sama atau tidak oleh petugas pajak, dan kalau berbeda apa penyebabnya.

Jadi tidak melihat individu-individu, tapi memperhatikan konsistensi di berbagai pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak,” ucap dia.

Laode menambahkan, DJP memiliki kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki risiko untuk tidak konsisten. “Misalnya, kantor pajak di Jakarta memperlakukan WP yang melanggar ketentuan A, apakah sama perlakuan petugas pajaknya dengan kantor pajak di Surabaya. Walau WP-nya beda dan petugas pajaknya berbeda juga, tetapi ketentuan yang dilanggar sama,” ujar dia.

Begitu juga yang terkait dengan restitusi pajak. BPK melihat konsistensi dari keputusan DJP terhadap WP. Terutama dalam hal menolak atau menyetujui restitusi pajak.

Dalam LKPP 2019, BPK menemukan adanya 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, DJP tidak segera memproses pembayaran restitusi pajak yang telah terbit surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 triliun, belum menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 ribu

”

BPK mempelajari data yang dibuat oleh DJP dan secara *sampling* melihat hasil-hasil pemeriksaan DJP.

serta terlambat menerbitkan SKPKPP senilai Rp6,07 miliar.

DJP menyajikan utang kelebihan pembayaran pendapatan (UKPP) atau utang restitusi per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 (*Audited*) masing-masing sebesar sebesar Rp28,14 triliun dan Rp24,60 triliun. Atas kewajiban 2019 tersebut, DJP belum menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), sehingga sampai dengan 31 Desember 2019, utang kelebihan pembayaran pajak tersebut belum dibayarkan kepada WP dan masih tercatat sebagai penerimaan pajak tahun 2019. ●



BPK dan PBB Bahas Perkembangan Pencapaian SDGs dan Penanganan Covid-19

PBB mendukung pelaporan Voluntary National Review mengingat laporan ini juga memuat perkembangan dan tantangan yang dihadapi pemerintah.

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono melakukan konferensi video dengan United Nations (UN) Resident Coordinator Indonesia yang diwakili oleh UNRC Coordinator Niels Scott pada Selasa (4/8). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh pandangan mengenai bagaimana PBB melihat kondisi saat ini di Indonesia dan membahas mengenai isu-isu terkait *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan BPK dapat memperoleh pemahaman global yang lebih komprehensif terkait SDGs untuk mendukung pelaksanaan audit SDGs di BPK, dan dapat mendukung peran BPK sebagai sebagai Anggota Komite Independent Audit Advisory Committee (IAAC) PBB yang bertanggung jawab untuk memberi masukan kepada Majelis Umum PBB (*General Assembly*) dalam membantu dan memenuhi tanggung jawab pengawasan.

Wakil Ketua BPK didampingi oleh Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif, Kepala Badan Diklat PKN Hery Subowo, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko B. Dwita Pradana, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Selvia Vivi Devianti dan staf Biro Humas dan Kerjasama Internasional serta perwakilan dari Tim SDGs.

Dalam konferensi video tersebut, Wakil Ketua BPK menyampaikan informasi singkat terkait implementasi SDGs oleh pemerintah Indonesia dan peran BPK dalam memberikan *assurance* terhadap Voluntary National Review yang disusun oleh Pemerintah Indonesia pada 2017 dan 2019. Lebih lanjut, terkait penanganan Covid-19, Wakil Ketua BPK juga menyampaikan kontribusi yang sudah dilakukan oleh UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN



■ Wakil Ketua BPK saat konferensi video dengan UN Resident Coordinator Indonesia.

OCHA) dengan menerbitkan Indonesia: Covid-19 Response Multi-Sectoral Response Plan Report. Selain itu, disampaikan juga terkait peran WHO dalam mendukung Kementerian Kesehatan dalam upaya menangani Rencana Tanggap Operasional Sektor Kesehatan untuk Covid-19.

Niels Scott menyampaikan apresiasi kepada BPK atas pengakuan terhadap kegiatan PBB di Indonesia. Niels Scott menyatakan, PBB memiliki kerangka kerja sama untuk lima tahun dalam *planning cycle* dengan Pemerintah Indonesia. Kemitraan tersebut dinilai sebagai kemitraan yang sehat. Kemitraan ini menekankan pada empat strategi prioritas dalam kerja sama antara lain *Inclusive Human Development, Economic Transformation, Climate and Disaster Resilience, dan Innovation to Accelerate The SDGs Achievement*.

Terkait Voluntary National Review, PBB sangat mendukung pelaporan ini mengingat laporan ini juga memuat perkembangan dan tantangan yang dihadapi pemerintah. Dengan adanya pandemi ini, diharapkan seluruh pihak dapat melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan dan bagaimana perkembangan SDGs, terutama untuk pemulihannya.

Dengan adanya telekonferensi tersebut, diharapkan informasi yang diperoleh akan dapat memberikan wawasan bagi BPK dalam menjalankan perannya sebagai anggota komite IAAC dengan menyampaikan sinergi dan kolaborasi yang dilakukan oleh PBB dengan pemerintah Indonesia selama ini terutama dalam menangani pandemi Covid-19. ●

BPK Usulkan *Parallel Audit* dalam Pertemuan SC WGEI



Kegiatan-kegiatan yang tertunda pelaksanaannya seperti pertemuan tatap muka tahunan dan pelatihan dipertimbangkan akan dilaksanakan secara virtual.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam Virtual Meeting of INTOSAI Working Group on Extractive Industries (WGEI) Steering Committee sebagai *observer*. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Selasa (11/8).

Pertemuan yang diikuti oleh anggota-anggota komite pengarah kelompok kerja ini, mengundang BPK sebagai tindak lanjut hasil pertemuan sebelumnya pada 3 Maret 2020. Dalam pertemuan tersebut, WGEI Steering Committee menyepakati BPK sebagai *observer* Steering Committee karena pengalaman BPK dalam memimpin IN-

TOSAI Working Group on Environmental Audit (WGEA). Ke depannya, BPK akan diundang dalam semua kegiatan WGEI Steering Committee.

Pertemuan ini diikuti hampir semua anggota WGEI Steering Committee, yaitu Uganda (Ketua WGEI), Afrika Selatan, Amerika Serikat, Ekuador, Fiji, Ghana, India, Norwegia, dan Zambia. BPK yang menjadi satu-satunya *observer* WGEI Steering Committee, diwakili oleh Tim Auditorat Utama Keuangan Negara VII (AKN VII) yaitu Kepala Sub Auditorat VII.A.3 Winarno, Pemeriksa dari AKN VII, Paulina Klara Fransiska Sinada dan Rino Widhy Leksono serta tim dari Biro Humas dan Kerjasama Internasional.

Pertemuan WGEI Steering Committee ini membahas perkembangan proyek-proyek dari Rencana Kerja 2020-2022 dan tantangan serta hambatan yang dihadapi terutama karena adanya pandemi Covid-19. Anggota Steering Committee menyepakati kegiatan-kegiatan yang tertunda pelaksanaannya seperti pertemuan tatap muka tahun-

an Steering Committee dan pelatihan-pelatihan dipertimbangkan akan dilaksanakan secara virtual.

Dalam pertemuan ini, delegasi BPK yang diwakili oleh Winarno dan Paulina Klara Fransiska, menyampaikan usulan BPK terkait pelaksanaan *parallel audit* terkait isu industri ekstraktif. Dengan kondisi pandemi saat ini, *parallel audit* dinilai sangat tepat menjadi forum untuk berbagi pengalaman audit secara virtual. Dengan *parallel audit*, tim audit tidak harus melaksanakan audit lapangan secara bersama, namun tim tetap menyusun rencana audit, kerangka waktu, dan laporan audit bersama secara virtual. Usulan ini didukung oleh mayoritas anggota Steering Committee. Sebagai tindak lanjutnya, Lembaga Pemeriksa atau Supreme Audit Institution (SAI) Uganda sebagai Sekretariat WGEI dan SAI Afrika Selatan sebagai Ketua Program akan berkoordinasi dengan BPK dalam menyiapkan rencana lebih lanjut.

Dengan berperan aktif di WGEI, BPK dapat mengambil manfaat dan pengetahuan terkait dengan pemeriksaan atas industri ekstraktif yang dilakukan SAI lain. Selain itu, WGEI ini dapat menjadi forum pengenalan dan eksternalisasi peran BPK terutama di bidang industri ekstraktif kepada komunitas internasional.

Pada awal tahun ini, BPK juga telah menunjukkan komitmennya dalam kerja sama pemeriksaan di bidang industri ekstraktif dengan mengirimkan dua orang auditor sebagai pengajar dalam kegiatan pelatihan yang digelar INTOSAI WGEI. ●

VINCENTIA MOLI AMBAR WAHYUNI

KEPALA BPK PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tegas Menegakkan Integritas



■ Vincentia Moli Ambar Wahyuni

Tegas dalam menegakkan integritas, independensi, dan profesionalisme adalah hal yang tak bisa ditawar bagi Vincentia Moli Ambar Wahyuni. Namun, perempuan yang sudah malang melintang di BPK sejak tiga dekade lalu itu juga punya prinsip bahwa tegas bukan berarti keras atau kasar.

Dengan mengusung nilai-nilai itu, Ambar berhasil membawa perubahan di beberapa perwakilan BPK yang ia pimpin. Dalam wawancara kepada *Warta Pemeriksa*, Ambar juga mengungkapkan sejumlah harapan terkait BPK di masa depan. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana kisah Ibu bisa masuk bergabung ke dalam keluarga besar BPK?

Saya masuk BPK pada 1990, tepatnya 1 Maret 1990. Awalnya, saya mendaftar di BPK Perwakilan Yogyakarta. Namun, sekitar dua tahun lebih tidak ada panggilan tes. Kemudian, saya disarankan untuk mendaftarkan diri ke BPK pusat di Jakarta. Saya mendaftar di Jakarta pada Januari 1990.

Tidak sampai sebulan, pada 1 Februari 1990 ada panggilan tes di Jakarta. Saya mengira tes hanya berlangsung satu hari. Sehingga saya berangkat menuju Jakarta dengan hanya membawa pakaian untuk sehari.

Ternyata, tes dilakukan pada Senin dan hasilnya diumumkan esok harinya. Kemudian, Selasa sudah ada tes lagi yang diumumkan pada Rabu dan begitu seterusnya hingga terakhir pada Jumat ada ujian psikotes.



Kemajuan teknologi harus diikuti juga dalam pemeriksaan, termasuk pemeriksaan berbasis teknologi informasi (TI).

Saya sempat meminjam uang ke sanak saudara dan membeli pakaian untuk seminggu di Jakarta. Hasil tes diumumkan akhir Februari dan Puji Tuhan saya diterima di BPK. Hanya berselang sepekan kemudian, saya harus masuk kantor di Jakarta. Semua serba cepat kalau memang sudah menjadi kehendak-Nya.

Bagaimana Ibu melihat BPK saat ini dibandingkan dengan masa lalu?

BPK saat ini sudah sangat modern. BPK mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan kini semua harus berbasis teknologi. Anggaran juga sudah sangat besar. Jumlah pegawai secara keseluruhan dan jumlah pemeriksa sudah berlipat ganda, menyesuaikan dengan jumlah entitas pemeriksaan. Gedung kantor pusat, gedung kantor perwakilan di 34 Provinsi, rumah jabatan, dan rumah dinas menunjukkan eksistensi BPK di seluruh Indonesia.

Saat masuk awal di BPK, teknologi belum berkembang sepesat ini. Kami masih menggu-

nakan mesin ketik manual. Pegawai atau pemeriksa kalau mengetik rangkap harus diberi alas karbon setiap halaman. Kalau ada yang salah, harus dihapus menggunakan penghapus atau *tipp ex* di setiap halaman. Kami harus menunggu kering baru diketik lagi.

Anggaran waktu itu juga masih terbatas. Bahkan, pemeriksaan pada satu entitas baru dapat diulang minimal tiga tahun kemudian.

Saat itu, latar belakang pendidikan pegawai banyak dari lulusan SLTA. Mereka kemudian melanjutkan pendidikan sambil bekerja. Kantor perwakilan juga hanya ada di tiga kota, yaitu Makassar, Yogyakarta, dan Medan.

Berapa lama Ibu menjabat kepala perwakilan BPK? Bagaimana karakter masing-masing daerah yang pernah Ibu rasakan?

Saya menjabat sebagai kepala perwakilan sejak Februari 2011 atau sudah sembilan tahun lebih hingga saat ini. Pertama kali menjabat adalah di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun, sampai dengan Februari 2013. Kemudian, saya ditugaskan ke Perwakilan Provinsi Lampung sampai dengan Februari 2016, selanjutnya ke Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan Februari 2020. Saya kemudian kembali ke Perwakilan Provinsi DIY yang merupakan rumah tinggal saya sejak SMA.

Setiap perwakilan punya karakteristik yang berbeda. Saat pertama kali bertugas di Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, ada fenomena penyelesaian laporan pemeriksaan keuangan membutuhkan waktu empat sampai lima bulan.

Namun, sejak saya datang tidak ada satu laporan pun yang selesai lebih dari 60 hari sejak diterima BPK. Bahkan, ada satu LHP (laporan hasil pemeriksaan) yang selesai dalam waktu sepekan.

Nilai IKU (indikator kinerja utama) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan pada 2011 langsung mencapai 105, karena semuanya hijau dan melebihi target. Demikian juga pada 2012, juga berhasil dipertahankan nilai 105. Begitu juga, setelah mutasi ke Perwakilan Provinsi Lampung, nilai IKU Perwakilan Provinsi Lampung mencapai 105 pada 2013, 2014, dan 2015.

Saya menjabat posisi kepala perwakilan paling lama yakni di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Saat saya datang, pemerintah daerah yang tepat waktu menyerahkan laporan keuangan *unaudited* TA 2015 hanya enam pemda. Sementara yang menyerahkan bulan Juni



dan Juli sebanyak enam pemda, sehingga harus masuk IHPS semester II.

Perwakilan Provinsi Sumatera Utara merupakan perwakilan yang paling berkesan bagi saya. Selain tempat saya paling lama bertugas, ada tantangan pmdanya yang masih banyak belum patuh. Sehingga, temuan relatif besar dibandingkan perwakilan yang saya alami sebelumnya (DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Lampung).

Di semua perwakilan, saya dekat dengan semua pegawai sampai pada sopir, satpam, dan *cleaning service*. Saya sangat menekankan integritas, independensi, dan profesionalisme kepada pelaksana maupun pemeriksa. Di manapun saya berada, saya tetap menegakkan integritas, independensi, dan profesionalisme. Saya tegas dalam berprinsip, namun menyampaikannya secara halus. Tegas bukan berarti keras atau kasar. Saya kadang menyampaikan kepada *auditee* sambil bercanda, sehingga mereka tertawa.

Apakah ada pengalaman tersendiri ketika menghadapi stakeholder eksternal seperti media di daerah?

Sejak menjadi kepala perwakilan saya selalu mengadakan kegiatan *media workshop* bersama media cetak, elektronik, maupun *online* minimal dua kali setahun dan *media visit*. Sejak di Perwakilan Provinsi Lampung minimal empat kali setahun untuk menyampaikan hasil pemeriksaan semester I dan II, hasil tindak lanjut triwulanan, dan hasil pemantauan kerugian daerah.

Untuk menghadapi media, harus bisa berdiplomasi, bisa menjelaskan bahasa teknis ke bahasa atau kejadian sehari-hari, supaya dapat diterima dan mudah dipahami oleh orang awam.

Namun, saya juga pernah menghadapi media yang “nakal” dan menulis sesuatu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Saya pernah mengadakan konferensi pers dengan menghadirkan perwakilan PWI dan KIP namun tetap saja apa yang ditulis media itu munculnya menjadi berbeda. Kami di BPK memiliki rekaman sehingga tidak gentar menghadapi media yang bertindak kurang profesional tersebut.

Apa yang Ibu harapkan dari BPK pada masa yang akan datang?

Kemajuan teknologi harus diikuti juga dalam pemeriksaan, termasuk pemeriksaan berbasis teknologi informasi (TI). Keahlian auditor dalam audit TI forensik harus ditingkatkan. Tidak hanya membongkar *file* dalam laptop, namun juga termasuk membongkar ponsel dan bahkan bekerja sama dengan operator seluler. Selain itu, tuntutan untuk bersikap profesional, harus diberikan skema *reward* dan *punishment*. *Reward* tentunya berbeda bagi para pihak yang berkinerja lebih baik.

Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pegawai BPK di seluruh Indonesia?

Pegawai BPK di seluruh Indonesia, baik unsur pemeriksa, fungsional lain, dan administrasi harus kompak. Teguh menegakkan integritas, independensi, dan profesionalisme. Jayalah BPK RI. ■



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

FUN BPK 2020

FESTIVAL UNTUK NEGERI BPK 2020

AYO DAFTAR
MENJADI PESERTA
BIBLIOBATTLE
SECARA DARING



BIBLIOBATTLE

PERPUSTAKAAN RISET BPK RI

Salam Literasi

Halo BPKawan

Apa kabar? Semoga bahagia dan sehat selalu

Kami kembali lagi dengan acara Bibliobattle

Bagi yang ketinggalan Bibliobattle Seri I, kami masih ada 2 seri lagi lho

Penasaran kapan dan gimana pelaksanaannya? Kepoin yuk....

Jadwal Pelaksanaan:

1. **Bibliobattle Seri II** dilaksanakan pada bulan **November 2020**. Buku yang bisa kalian pilih adalah buku fiksi/non fiksi dengan tema Individu/Self Improvement
2. **Bibliobattle Seri III** dilaksanakan pada bulan **Desember 2020**. Buku yang bisa kalian pilih adalah buku fiksi/non fiksi dengan tema Keluarga/Gender.

Caranya:

1. Buat video dengan durasi 3-5 menit yang berisi review dari buku tersebut. Buat semenarik mungkin agar orang lain yang melihat tertarik untuk ikut membaca buku tersebut.
2. Unggah video yang sudah kalian buat di akun instagram kalian masing-masing **sesuai jadwal pelaksanaan** setiap seri.
3. Info lebih lanjut pantau terus Instagram @bpkriofficial dan @bpkriolib.

Ditunggu partisipasinya BPKawan....

#BPKRI

#PERPUSTAKAANRISETBPKRI

#BPKFUN2020

**Dapatkan
Hadiah**

Uang tunai
Souvenir
e-certificate



Bisnis Pempek tak Lekang oleh Waktu



Pempek merupakan produk kuliner yang unik dan memiliki cita rasa yang disukai masyarakat banyak. Bisnis pempek juga bukanlah bisnis musiman.

Berawal dari pengalaman berjualan sejak remaja, Nissa Hanny Tatiara, salah satu pegawai Badan Pemeriksa Keuangan, membangun bisnis Pempek dan tekwan. Ia menamai produk makanan khas asal Palembang tersebut dengan nama "Pempek Si Mpok".

Nissa yang saat ini menjabat Kepala Sub Bagian Keuangan Auditorat Keuangan Negara IV, mengaku memulai bisnis pempek dan tekwan sejak 2015. "Pempek dan Tekwan yang saya jual merupakan buatan saudara yang asli dari Palembang," kata Nissa.

Bila dirunut ke belakang, Nissa menyatakan memulai berjualan pempek dan tekwan di sekolah anaknya dan lingkungan perkantoran. Salah satunya, tutur dia, di kantor BPK. Ia awalnya tidak langsung berjualan ke



rekan-rekan kantor. Alih-alih meminta orang untuk membeli, ia justru membawa sampel pempek dan kemudian dibagikan kepada rekan kantor.

"Alhamdulillah, cita rasa pempek dan tekwan yang cocok dengan lidah teman-teman dan rekan kerja mengantarkan saya hingga seperti sekarang ini," ucap dia.

Nissa awalnya hanya menjual pempek dalam bentuk *frozen*/beku. Hingga kemudian dalam satu tahun penjualan

makin meningkat yang dari semula di wilayah Jabodetabek menjadi ke beberapa pulau di Indonesia. Bahkan beberapa teman dan rekan kerja membawa pempek keluar negeri sebagai oleh-oleh untuk kerabat yang tinggal di sana.

Melihat potensi pasar dalam dua tahun terakhir ini, Nissa mulai menawarkan pempek dalam tampah yang siap untuk dikonsumsi. Responsnya pun menurut Nissa luar biasa po-

sitif, karena pesanan meningkat setiap harinya.

“Respons positif pun terjadi pada penjualan tekwan yang sudah dilengkapi bumbu dan bahan pelengkap lainnya karena memudahkan pembeli untuk memasak sendiri di rumah,” ujar dia.

Ia mengaku memiliki perasaan bahagia saat Pempek dan Tekwan Si Mpok dipesan untuk acara besar di kantor, karena saat itulah kesempatan yang baik untuk mempromosikan produknya. Untungnya, ucap dia, banyak rekan kerja yang merupakan penggemar pempek, sehingga mereka selalu melakukan *repeat order*.

Jika ditanya alasan menjual pempek, Nissa menyebut jawabannya simpel. Hal itu karena ia dan keluarga adalah penggemar pempek. Selain itu, ia menilai pempek merupakan produk kuliner yang unik dan memiliki cita rasa yang disukai masyarakat banyak. Nissa menambahkan, bisnis pempek juga bukanlah bisnis musiman, sehingga tak heran pebisnis pempek tetap eksis dan banyak jumlahnya.

Meski bekerja di BPK alias *orang kantoran*, Nissa menyebut bisnisnya tak sampai mengganggu pekerjaan. Sebab, ia dibantu oleh keluarga besarnya dalam menjalankan bisnis. Di lain sisi, dengan kemudahan teknologi, ia dapat melakukan koordinasi dari jarak jauh, sehingga pekerjaan di kantor tidak terganggu. “Saya juga masih memiliki *quality time* yang cukup dengan keluarga,” kata Nissa.

Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 memberikan tantangan yang cukup berat bagi bisnis yang dijalani Nissa. Kendala terberat yaitu saat awal-awal diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sejumlah wilayah. PSBB sempat membuat pengiriman ke daerah-daerah terhambat, bahkan tak jarang pesanan harus dibatalkan. “Jadi, penjualan dan pengiriman hanya bisa dilakukan sekitar wilayah Jabodetabek.”



Kendati demikian, Nissa menilai ada hikmah yang bisa dipetik dari adanya pandemi. Menurut dia, pandemi Covid-19 membuat bisnis kuliner berbentuk *frozen food* kian diminati karena mudah dalam proses memasaknya. Ia pun tak patah arang selama pandemi dan justru menambah promosi/iklan di status Whatsapp dan Instagram.

“Promosi juga saya lakukan melalui beberapa *public figures* yang setelah

Tips Berbisnis

- Realisasikan ide bisnis Anda dan jangan takut untuk memulai, karena langkah pertama selalu yang paling sulit.
- Pilihlah bisnis yang sesuai dengan kemampuan Anda, karena Anda akan lebih mudah menjalankan bisnis tersebut.
- Hitung modal Anda secara cermat agar tidak merugi di kemudian hari.
- Anda tidak mungkin berbisnis sendirian, rekrut/kerja sama dengan orang kepercayaan yang memiliki kredibilitas dan integritas yang tinggi.
- Jangan malu untuk mempromosikan produk Anda, karena sesungguhnya Anda sedang belajar meningkatkan *skill* dalam berkomunikasi dengan orang lain.
- Jangan lupa untuk membahagikan diri sendiri dan sisihkan waktu untuk bersantai dengan keluarga.

mencoba Pempek Si Mpok ternyata menyukai rasanya dan merekomendasikan kepada *followers* mereka. Dari hasil rekomendasi *public figures* tersebut, alhamdulillah terdapat banyak pesanan dari pelanggan baru,” ucap dia.

Bagi yang ingin memesan, tutur dia, pemesanan dapat dilakukan via Whatsapp ke nomor 081362386213 atau *direct message* ke Instagram @pempek_simpok. Jasa pengiriman yang digunakan, antara lain, Gojek, Grab, Paxel, Lion parcel, JNE dan jasa ekspedisi lainnya.

“Dalam waktu dekat, saya berencana akan menjual pempek dan tekwan melalui *online store* seperti Tokopedia, Shopee, maupun GoFood.” ●

FESTIVAL UNTUK NEGERI (FUN) BPK

BIBLIOBATTLE

SERI I

Pemenang Utama

1

Suci Humaira Sophia

suci.sophia

"The Red Haired Woman"

10 Pemenang Favorit

1. Yanti Magdalena Samosir

2. Petra Yosalya Molle

3. Rahma Aulia

4. Lusia Dara Sari

5. Nurirvan Mulia Putra Ahmad

6. Rizka Amalia Sari

7. Ichsan

8. I Komang Doni Kurniawan

9. Rusdiah

10. Gilbert Simson Gattang

Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

BPK berupaya mendorong agar seluruh rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindaklanjuti dengan serius.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 kepada seluruh entitas atau 38 kementerian/lembaga yang berada di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III. Kendati demikian, Anggota/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi mengungkapkan, BPK memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan tindak lanjut. Sehingga, BPK berupaya mendorong agar seluruh rekomendasi yang telah diberikan dapat ditindaklanjuti dengan serius.

“Tindak lanjut merupakan sebuah mahkota, oleh karena itu BPK ingin seluruh tindak lanjut yang telah direkomendasikan agar ditindaklanjuti dengan serius,” ujar Achsanul ketika menyerahkan LHP LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Selasa (18/8).

Pada penyerahan LHP tersebut, Achsanul menyampaikan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, LK Kemendes PDTT TA 2019 telah disajikan secara wajar dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meskipun mendapat opini WTP, Anggota III BPK mengungkapkan bahwa BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang menjadi catatan BPK. Baik permasalahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) atau pada Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Anggota III BPK menjelaskan permasalahan yang ada pada SPI di antaranya, yaitu penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak tertib. Sedangkan pada kepatuhan di antaranya adanya kelebihan pembayaran perjalanan dinas serta kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kemendes PDTT untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) atas PNBP lainnya di lingkungan Kemendes PDTT serta mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas



■ Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun Anggaran (TA) 2019 oleh Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi kepada Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar di Kantor Kemendes PDTT, di Jakarta, pada Selasa (18/8).

negara. Dengan rekomendasi tersebut, Achsanul berharap, ke depannya permasalahan yang menjadi temuan dalam pemeriksaan tahun ini tidak ditemukan di tahun selanjutnya.

Dalam penyerahan secara virtual LHP atas LK Tahun 2019 kepada 24 pimpinan K/L di lingkungan AKN III, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) III Bambang Pamungkas juga mengapresiasi usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak entitas. BPK akan terus mendorong pihak kementerian/lembaga untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan secara sistemik dan konsisten.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah diserahkan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pimpinan kementerian/lembaga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dia menyampaikan, LHP akan lebih bernilai apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa entitas pemeriksaan wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. ■



BPK Perkuat Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

MoU sebelumnya hanya terkait penegakan hukum atas hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi. Sementara MoU yang baru memuat ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup juga penguatan kelembagaan dan kerja sama dalam penguatan bidang sumber daya manusia.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperkuat kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan RI. Penguatan kerja sama telah dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman atau *memorandum of understanding* (MoU) yang isinya tak hanya penegakan hukum, tapi juga kerja sama kelem-

bagaan dan sumber daya manusia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna dengan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di kantor pusat BPK, Jakarta, 11 Agustus 2020. "Semoga nota kesepahaman antara BPK-Kejaksaan RI dan BPK-Kapolri menjadi langkah baru yang semakin memperkuat koordinasi dan sinergi instansi," kata Agung.

”

Semoga nota kesepahaman antara BPK-Kejaksaan RI dan BPK-Kapolri menjadi langkah baru yang semakin memperkuat koordinasi dan sinergi instansi.

Agung menjelaskan, MoU dengan Kejaksaan RI yang ditandatangani merupakan pembaruan dari MoU yang sudah ada sebelumnya, yaitu MoU antara BPK dan Kejaksaan RI tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK yang Diduga Mengandung Unsur Tindak Pidana yang ditandatangani pada 25 Juli 2007. Selain itu, pembaruan atas MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, atau terkait dengan *e-audit* yang ditandatangani pada 2011.

MoU dengan Polri juga merupakan pembaruan dari MoU sebelumnya tentang Tindak Lanjut Penegakan Hukum Terhadap Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang Berindikasi Tindak Pidana yang ditandatangani 21 November 2008 dan MoU tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara atau terkait dengan *e-audit* yang ditandatangani pada Tahun 2011.

Selain dengan Kejaksaan Agung dan Polri, BPK juga sudah memper-



■ Penandatanganan Nota Kesepahaman BPK dan Polri.

barui MoU dengan aparat penegak hukum lainnya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 7 Januari 2020. MoU tersebut mengenai kerja sama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Agung menjelaskan, MoU sebelumnya dengan Kejaksaan RI dan Polri hanya terkait penegakan hukum atas hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana korupsi. Sementara MoU yang baru memuat ruang lingkup yang lebih luas karena mencakup juga penguatan kelembagaan dan kerja sama dalam penguatan bidang sumber daya manusia antara BPK-Kejaksaan RI dan BPK-Polri.

Perluasan lingkup juga dilakukan dalam MoU antara BPK dan KPK. Selain itu, pembaruan MoU meliputi masa berlaku, pola koordinasi dan *monitoring* pelaksanaan dari MoU, sehingga memberikan satu indikator pengukuran yang lebih jelas dan terukur dari sisi kinerja masing-masing.

Penandatanganan MoU turut dihadiri secara fisik oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono, Anggota I BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Hendra Susanto, Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar, Anggota VII BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Daniel Lumban Tobing, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Pejabat Pimpinan Madya di lingkungan BPK.

Selain peserta fisik, acara ini dihadiri secara virtual oleh Anggota BPK, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan BPK, Kejaksaan RI dan Polri, para Jaksa Agung Muda dan juga para Kajati dan Kapolda seluruh Indonesia serta wakil dari Kajari dan Kapolres dari 34 provinsi. ●



■ Penandatanganan Nota Kesepahaman BPK dan Kejaksaan RI.

Bahrullah Akbar Buka Orientasi Kepalangmerahan

Orientasi ini bertujuan memberikan pembekalan dan pemahaman tentang organisasi kepalangmerahan serta meningkatkan pengetahuan peserta di bidang kepalangmerahan.

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2020 hingga 2025, membuka Orientasi Kepalangmerahan pada Rabu (19/8). Orientasi ini bertujuan memberikan pembekalan dan pemahaman tentang organisasi kepalangmerahan serta meningkatkan pengetahuan peserta di bidang kepalangmerahan.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Gedung PMI DKI Jakarta, Jakarta Pusat tersebut, diikuti oleh jajaran Dewan Kehormatan dan Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta Masa Bakti 2020-2025. Selain Bahrullah Akbar, turut hadir memberikan sambutan pada kegiatan ini Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Effendi. Adapun jumlah peserta yang berasal dari unsur Dewan Kehormatan sebanyak 7 (tujuh) orang, dan Unsur Pengurus Provinsi DKI Jakarta sebanyak 17 orang.

Orientasi kepalangmerahan



■ Pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2020-2025, 5 Agustus 2020.



■ Pelantikan Bahrullah Akbar sebagai Ketua Dewan Kehormatan PMI Provinsi DKI Jakarta.

merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan setelah terbentuknya suatu kepengurusan. Orientasi ini bertujuan untuk memberikan pembekalan pemahaman tentang organisasi kepalangmerahan serta meningkatkan pengetahuan peserta di bidang kepalangmerahan.

Kepengurusan ini baru saja ditetapkan usai digelar kegiatan Musyawarah Provinsi (Musprov) Ke-12 Tahun 2020 pada 15 Juli 2020. Dalam Musprov itu, telah terpilih Pengurus Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti Tahun 2020-2025 dengan Ketua Rustam Effendi.

Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Effendi pun dilantik Ketua Umum PMI Pusat Jusuf Kalla dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan pada 5 Agustus 2020 di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam kesempatan tersebut juga dilantik Dewan Kehormatan PMI Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti Tahun 2020-2025, yaitu Bahrullah Akbar sebagai Ketua dan anggota terdiri atas Irjen Pol (Purn) Drs Ketut Untung Yoga, Hamdra Samal, Mohammad Feriadi, Andreas Sofiandi, Wildan S Niam, dan Handaka Santosa.

Bahrullah Akbar bukanlah orang baru di dunia kepalangmerahan. Ia sebelumnya pernah meraih penghargaan PMI karena telah 50 kali mendo-norkan darahnya. ●

Tantangan Penyerapan Anggaran



BPK saat ini sedang dalam tahap persiapan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Strategi pemeriksaan yang akan diterapkan adalah pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (*risk-based comprehensive audit*).

Kecepatan penyerapan dan realisasi anggaran adalah hal yang penting di masa krisis, namun hal tersebut bukanlah satu-satunya yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam penanganan pandemi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agus Joko Pramono saat menjadi narasumber utama dalam webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta pada Kamis (27/8).

Agus Joko Pramono mengatakan, selain kecepatan penyerapan dan realisasi, anggaran penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga harus efektif (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah dan kualitas) dan akuntabel. Ia mengatakan, peran BPK adalah untuk memastikan bahwa

pelaksanaannya efektif, transparan, dan patuh pada ketentuan.

"BPK dengan peran *oversight, insight, dan foresight* berperan memberikan keyakinan (*assurance*) dan saran perbaikan (*improvement*) agar pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan patuh terhadap ketentuan dalam kondisi darurat," kata Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus mengatakan, dalam penanganan Covid-19 pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar dan lintas sektoral. Dari semula Rp405,1 triliun (Perpres Nomor 54 Tahun 2020) menjadi Rp695,2 triliun (Perpres Nomor 72 Tahun 2020). Anggaran tersebut belum termasuk dana penanganan Covid-19 oleh pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah, serta badan/entitas lain yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

Agus menambahkan, BPK saat ini sedang dalam tahap persiapan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Strategi pemeriksaan yang akan diterapkan adalah pemeriksaan berbasis risiko secara menyeluruh (*risk-based comprehensive audit*).

Selain Wakil Ketua BPK, kegiatan webinar ini menghadirkan narasumber lainnya, yaitu Arief Budimanta, Staf Khusus Presiden Bidang Perekonomian dan Dianwicakasih Arieftiara, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta dan para pemeriksa di lingkungan BPK tersebut dibuka oleh Rektor UPN Veteran Jakarta, Erna Herawati.

Dalam sambutannya, Rektor UPN Veteran Jakarta berharap agar webinar dengan tema "Tantangan dan Kebijakan Mendorong Peningkatan Penyerapan Anggaran Di Era Pandemi" ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman terkait strategi audit yang dilakukan BPK dan langkah pemerintah dalam pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19. ●

Mengenal Kompetensi ASN

DARI PERSPEKTIF *GOWESER*



■ OLEH **HERY SUBOWO**,
KEPALA BADAN DIKLAT PKN BPK

Dalam dunia *gowes*, kompetensi pun dibutuhkan agar kita dapat melakukan *gowes* dengan aman, nyaman, menyenangkan dan mencapai target dan tujuan yang direncanakan.

ASN yang *goweser* dan *goweser* yang ASN. Keduanya bertemu pada satu titik persamaan, sama-sama membutuhkan kompetensi untuk melakoninya. Meskipun belum semua ASN memahami kompetensi tersebut, setidaknya banyak ASN yang mengenal, memahami, menyukai bahkan menggilai *gowes*. Oleh karena itu tulisan ini mencoba menggunakan perspektif *goweser* dalam menggambarkan apa itu kompetensi.

Jenis Kompetensi

Berbicara tentang kompetensi ASN, sudah banyak ketentuan yang mengatur tentang kompetensi ASN, mulai dari yang paling tinggi UU No. 5/2014 tentang ASN, PP No.11/2017 tentang Manajemen PNS hingga aturan pelaksanaannya di Permenpan RB No. 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN. Menurut peraturan tersebut, Kompetensi Jabatan ASN merupakan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan. ASN harus memiliki 3 jenis kompetensi: teknis, manajerial, dan sosio kultural.

Dalam dunia *gowes*, kompetensi pun dibutuhkan agar kita dapat melakukan *gowes* dengan aman, nyaman, menyenangkan dan mencapai target dan tujuan yang direncanakan. Bayangkan jika seseorang tidak menguasai teknik bersepeda, rambu lalu lintas, medan yang akan dilalui, atau *trouble shooting* jika terjadi kerusakan. Pernahkah kita ikut acara *gowes* yang diadakan tanpa rencana yang jelas, masing-masing *goweser* mengurus keperluannya sendiri, perubahan rute tidak dikomunikasikan dengan baik dan masing-masing berusaha untuk mendahului yang lain dengan caranya sendiri tanpa ada yang mengendalikan?

Atau coba kita berandai-andai berada pada komunitas yang eksklusif, di mana keanggotaannya berdasarkan tempat instansi yang sama, sepeda yang sejenis/*se-merk*, domisili yang satu daerah, atau berbagai sekat identitas lainnya. Tentu aktivitas *gowes* akan menjemukan, menyebalkan bahkan membahayakan kita, peserta lain, bahkan lingkungan sekitarnya.

Gowes mengajarkan kita pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang wajib dimiliki/dipenuhi oleh setiap ASN baik yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan (kompetensi teknis), maupun yang dibutuhkan untuk memimpin dan/

atau mengelola unit organisasi (kompetensi manajerial) atau pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk (kompetensi sosio kultural) untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Kompetensi Teknis

Sepeda dan perangkatnya itu termasuk barang pribadi, akan terasa tidak nyaman jika menggunakan yang bukan pegangannya. Pilihan sepeda tergantung kondisi dan preferensi *user*-nya, sehingga *goweser* setidaknya memiliki pemahaman yang memadai tentang sepeda dan perangkatnya. Baik yang terpasang di sepedanya yaitu *frame, saddle, handlebar, brake, suspension, crank, sprocket, stem, shifter*, hingga *tracking equipment*, maupun yang melekat di badannya seperti *jersey, helm, google, cycling pant, gloves, heart rate* dan sebagainya.

Di samping pemahaman perangkat, seorang *goweser* juga harus menguasai keterampilan umum bersepeda seperti bagaimana mengayuh, oper gigi, mengerem, menjaga keseimbangan, dan membaca rambu. Kemahiran itu akan semakin bertambah seiring dengan banyaknya latihan dan keikutsertaan pada berbagai acara *gowes*. Ia akan terbiasa mengerem yang aman di jalan licin, menghemat tenaga saat *ngeroll* di turunan-tanjakan, oper gigi tanpa *slip* rantai, memaksimalkan aplikasi dan *tracking tools* bahkan mengambil foto saat melaju.

Kebanyakan *goweser* sangat familiar dengan GPS, mulai dari *Global Positioning System*, "Gunakan Penduduk Setempat" hingga "Gak Pernah (ke) Sasar". Ini menunjukkan tingkat pemahaman dan penguasaan rute, mirip dengan kecerdasan spasial (mengetahui ruang). Di samping *goweser* biasa, ada juga mereka yang memiliki ketrampilan khusus seperti "raja tanjakan", "jago downhill", "spesialis balap", atau sebutan lain yang menggambarkan keunggulannya.

Gowes menggambarkan kepada kita bahwa ASN harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang berkaitan dengan bidang teknis

jabatannya, baik yang bersifat umum maupun yang spesifik dengan tingkat penguasaan bervariasi dari mulai *aware, basic*, dan *intermediate*, hingga *advance* dan *expert*.

Kompetensi Manajerial

Pengabdian ASN harus selalu berorientasi pada hasil yaitu mensejahterakan masyarakat sebagai bagian dari tujuan bernegara. Untuk mencapainya ASN diharapkan senantiasa memberikan Pelayanan Publik dengan sebaik-baiknya. Pelayanan kepada masyarakat akan meningkat melalui Manajemen Perubahan terhadap inovasi dan kreativitas perbaikan sistem. Perubahan ke arah perbaikan harus berdasarkan Pengambilan Keputusan yang dapat diandalkan.

Keputusan tersebut diambil melalui Kerjasama sinergis antar personal, unit dan instansi. Kerjasama akan efektif jika masing-masing pihak berupaya melakukan Pengembangan Diri dan Orang Lain secara berkesinambungan. Pada akhirnya pengembangan akan optimal melalui Komunikasi yang baik dengan dilandasi oleh nilai-nilai integritas para pihak dalam organisasi.

Orientasi pada Hasil

Gowes akan terasa lebih asyik dan seru jika kita tetapkan target yang akan dicapai. Bisa berupa jarak yang harus ditempuh, jangka waktu

yang harus dicapai, atau jumlah peserta yang berpartisipasi, yang biasanya disesuaikan dengan angka atau *event* tertentu. Ada juga yang menargetkan rute tertentu sehingga membentuk gambar yang bermakna (*artcycling*). Makin bagus dan unik gambarnya, makin menantang untuk menyusurinya.

Apapun bentuk targetnya, jika sudah ditetapkan maka semua pihak berusaha untuk mencapainya. Panitia sibuk pada persiapan rute, survai lokasi, penyediaan logistik dan "kerintilan" lainnya. Peserta fokus buat latihan fisik agar bisa siap dgn segala medan baik itu "rute damai", tapi juga "tanjakan manja" bahkan "jalur neraka". Meskipun persiapan sudah matang, namun tetap saja harus diantisipasi kendala seperti kemacetan, penutupan jalan, kesasar/salah rute, hujan, cedera, insiden di jalan atau keterlambatan karena banyaknya mampir-mampir yang tidak terjadwal



Pengabdian ASN harus selalu berorientasi pada hasil yaitu mensejahterakan masyarakat sebagai bagian dari tujuan bernegara. Untuk mencapainya ASN diharapkan senantiasa memberikan Pelayanan Publik dengan sebaik-baiknya.

untuk mencoba kuliner atau memburu *spot* foto yang bagus. Antisipasi ini penting agar kendala tersebut tidak merubah/menghambat secara signifikan pencapaian target.

Melalui *gowes* ASN dapat mengasah kompetensi orientasi pada hasil dengan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.

Pelayanan Publik

Bagi *goweser* yang mendapat giliran menjadi panitia ini merupakan sebuah tantangan. Bagaimana membuat acara *gowes* tersebut berkesan dan memuaskan seluruh peserta. Bagian dokumentasi memastikan tidak ada *spot* dan momen menarik yang terlewat, dari sekadar *photo group*, saat rehat, posisi melaju, hingga “aksi sok-sokan angkat sepeda”. Yang bertugas mengurus logistik sudah *stand by* di *pitstop* dan *finish* dengan beragam kudapan penambah energi dan minuman pelepas dahaga.

Yang punya tenaga ekstra biasanya dengan senang hati *sprint* hilir mudik ke depan dan belakang untuk mengatur kecepatan “*Road Captain*” (RC) sekaligus mengecek yang tercecer paling “buncit”. Sementara sang RC melaju paling depan menyusuri rute dan memastikan rombongan sampai di garis finis yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan rambu dan etika di jalan.

Panitia melayani semua peserta tanpa pilih kasih, tidak memandang kelas sosial peserta, juga tidak membedakan jenis dan harga sepeda mereka. Panitia pun tidak iri dengan *goweser* yang cuma sebagai peserta tidak kebagian tugas, karena ini hanya pembagian peran yang silih berganti. *Event* sekarang melayani sebagai panitia, di rute berikutnya dilayani sebagai peserta.

Gowes mengajarkan ASN tentang kompetensi pelayanan publik dengan melaksanakan tugas-tugas

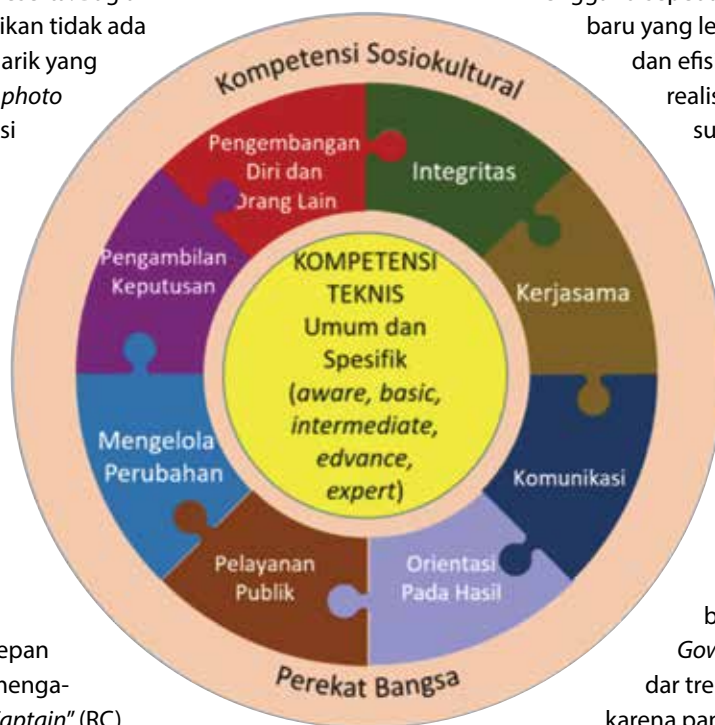
pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok golongan/partai politik.

Manajemen Perubahan

Karakter sepeda yang harus terus berjalan agar bisa seimbang mengandung makna bahwa *goweser* juga harus aktif bergerak mengikuti bahkan mengantisipasi perubahan agar kegiatan *gowes*-nya “*sustainable*”. Untuk mendapatkan sepeda yang sesuai dengan kebutuhan, *goweser* harus paham jenis, merk, fitur sepeda dan segala pernikernya. Perubahan teknologi juga kadang menggoda *goweser* mengganti sepedanya dengan keluaran baru yang lebih ringan, nyaman dan efisien. Tentunya harus realistis dalam menyesuaikan sepeda dengan kemajuan teknologi, agar jangan sampai “ringan di timbangan - berat di cicilan”.

Tidak hanya soal teknis, *goweser* juga harus *aware* terhadap perubahan strategis bagaimana sepeda bisa menyelamatkan bumi “*save the planet*”. *Gowes* tidak hanya sekadar tren musiman (misalnya karena pandemic Covid-19), tapi kini telah berubah menjadi gaya hidup dan kebutuhan melalui gerakan *Bike to Work* (B2W). Ada banyak contoh di mana konsistensi satu orang bersepeda berkembang menjadi komunitas *goweser* hanya dalam bilangan bulan. *Goweser* membuktikan bahwa mereka bukan hanya “*follower*”, tapi juga “*agent of change*” dan “*trend setter*” dalam gaya hidup sehat dan isu lingkungan hidup.

Lewat para *goweser*, ASN belajar bagaimana mengelola perubahan dengan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung



jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.

Pengambilan Keputusan

Hidup ini pilihan, demikian juga dengan *gowes*. Dalam dunia *pergowesan* ada banyak ragam pilihan yang butuh kecerdasan dan kecermatan disamping kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan. *Inspired by Cerdas Cermat SD/SMP dan Cepat Tepat SMA* era 80-90 an, dalam memilih sepeda, kita bisa pake MTB yang cocok untuk jelajah jalan-jalan kampung dan *off-road*, atau jenis RB yang pas untuk jalan mulus dan jarak jauh ala *tour-tour-an*, atau sepeda lipat untuk sekadar *funbike* dalam kota, berangkat ke kantor atau sekadar keliling di sekitar lingkungan tempat tinggal. Disesuaikan dengan selera, peruntukan, dan kemampuan, dan, yang terpenting, jangan sampai kalau ketahuan harganya bisa ribut dengan orang rumah.

Dalam memilih rute *goweser* juga harus mempertimbangkan komposisi peserta. Ada "nanjaker" yang tetap semangat memburu "elevation gain" tapi ada juga "matador" yang pas "masuk tanjakan dorong". Tidak semua rute sesuai dengan kekuatan fisik *goweser*. Seringkali mereka harus bijak memilih beristirahat atau *stop* ketika sudah sangat kepayahan, tidak perlu gengsi mengikuti *goweser* lainnya, daripada berisiko cedera, "blackout" atau bahkan kematian.

Gowes menunjukkan ASN bagaimana pengambilan keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Kerjasama

Orang bijak berkata bahwa kekuatan sebuah rantai justru terletak pada mata rantai yang terlemah. Jika mata rantai terlemah itu putus maka seluruh rantai menjadi tidak berguna lagi. Filosofi ini dipahami benar oleh komunitas *gowes*. Oleh karenanya dalam perjalanan *gowes* mereka selalu kompak dan tidak saling meninggalkan. "Kita *start* bersama maka harus juga *finish* bersama-sama", begitu mottonya. Yang kuat kadang harus mendorong yang terengah-engah mengayuh, atau bahkan berhenti menemani istirahat sambil berbagi logistik dan jepretan foto.

Jika ada sepeda yang mengalami kerusakan, *goweser* lainnya pun berhenti untuk sekadar menanyakan kendalanya, menyarankan solusi, meminjamkan alat hingga turun tangan langsung bantu memperbaiki sebisanya. Saat menyusuri jalur ramai

kendaraan atau hendak melintasi perempatan, *goweser* lainnya dengan sukarela melambaikan tangan atau menghalangi jalan dengan sepedanya agar rombongan aman melintas. Dan tak lupa, saling *share* hasil jepretan foto *candid* dan rekaman video lucu *via japri* atau ke WAG dan medsos menjadi lagu wajib sebelum *gowes* bubar.

Gowes melatih ASN untuk kerjasama dengan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

Pengembangan Diri dan Orang Lain

Dunia *gowes* kini tidak hanya sebagai sebuah hobi pengisi waktu luang, tapi juga sudah menjadi bagian dari "life style" dan bahkan sumber penghasilan yang menjanjikan. Apapun itu motifnya, semua *pegowes* pastilah mengalami tahapan dalam mengembangkan dirinya, dari sekadar pemula, senior, dan mumpuni hingga *expert* dan *pro*. Mereka yang baru menyukai *gowes* biasanya suka bertanya-tanya dan senang mencoba-coba sepeda temannya, *searching* di internet, dan nonton aksi-aksi *goweser* di youtube.

Yang sudah hobby akan sering latihan agar memiliki fisik yang kuat karena dia harus siap berbagai cuaca dari udara sejuk segar hingga terik panas yang membuat kulit seperti terbakar. *Goweser* senior akan selalu terpancing untuk *sharing* pengalamannya kepada *goweser* pemula. Baik itu lewat obrolan ringan pada waktu rehat di *pitstop*, instruksi kecil saat mengayuh, hingga *sharing session* di acara-acara komunitas. *Goweser pro* sering diundang untuk *coaching clinic* di berbagai acara *tour* sepeda.

Gowes mendorong ASN untuk selalu melakukan Pengembangan Diri dan Orang Lain dengan meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.

Komunikasi

Gowes bukanlah aktivitas soliter yang menyendiri jauh dari keramaian. Umumnya orang ber-*gowes* itu mengajak teman, tetangga, dan sejawat karena dalam *gowes* itu "the more, the merrier". Makin banyak yang ikut, makin seru dan asyik. Keseruan dan keasyikan

itu bisa jadi buyar jika komunikasi di dalamnya tidak efektif.

Bagaimana tim survei meyakinkan bahwa rute hasil survainya layak dicoba baik karena jalurnya menantang, banyak "*pitstop*" yang perlu disinggahi, melimpah *spot* menarik untuk foto atau karena beragam kuliner yang layak dicoba. Sepanjang perjalanan *goweser* juga perlu memperhatikan etika dalam berkomunikasi baik ketika menegur sapa warga yang dilewati, bertanya saat kesasar, minta izin melewati portal, memberi *sign* ketika hendak berbelok, dan membunyikan bel/klakson saat melintasi orang banyak. Juga bagaimana menyemangati peserta yang kepayahan untuk terus mengayuh, jangan sampai malah membahayakannya karena sudah mendekati ambang batas "*heart rate*" yang diperbolehkan.

ASN belajar dari para *goweser* bagaimana melakukan komunikasi untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis, memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif; mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Integritas

Gowes tidak hanya soal kesenangan saja tapi juga tetap menjaga nilai etika yang berlaku dalam diri dan lingkungannya. Di acara *funbike* ataupun *tour*, para *goweser* tetap harus menaati rambu lalu lintas dan tidak potong rute (*by pass*) untuk menyalip *goweser* lain atau sampai lebih dulu di tujuan akhir. Dalam penggunaan aplikasi *tracking*, tidak pernah ada *goweser* yang berusaha "mengakali" dengan menggunakan motor atau mobil menempuh jarak lebih jauh agar tampil teratas di klasemen *strava*, *runtastic* atau *endomondo*, karena hal itu tidak hanya membohongi komunitas tapi juga diri sendiri.

Komunitas *goweser* biasanya bisa dipegang janjinya dalam menentukan waktu dan tempat berkumpul, kapan dan dimana, serta menggunakan *jersey* yang mana. Komunitas *gowes* ada yang menempuh jarak ratusan kilometer untuk mudik. Tidak hanya sekadar menyalurkan hobi tapi juga dalam rangka silaturahmi dengan keluarga di kampung sekaligus juga menyampaikan pesan untuk memperjuangkan hak-hak pesepeda yang kurang dihargai di jalan. *Goweser* di luar negeri bahkan ada yang bersepeda dari London ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Menempuh perjalanan ribuan mil tanpa membebani masyarakat setempat yang dilaluinya demi mencapai tujuan mulia.

Gowes mengajarkan ASN untuk menjaga integritas dengan konsisten berperilaku selaras dengan nilai,

norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya

Kompetensi Sosio Kultural

Sebagaimana komunitas lain, anggota *goweser* pun bisa berasal dari beragam latar belakang. Mereka dipersatukan dengan semangat kebersamaan. Tidak peduli sepeda Moulton, Brompton bahkan Polygon sekalipun bisa ikut bergabung. Suatu komunitas *goweser* biasanya lintas suku, beragam agama, bermacam golongan, berbeda instansi, bervariasi ras, bahkan berjarak antar negara. Tidak peduli *gender*, tidak membedakan pemula, amatir dan profesional.

Awalnya mungkin ada yang *gowes* karena terpaksa mendampingi pimpinan atau ikut-ikutan *trend*. Namun biasanya setelah ikut sekali dua, jadi keterusan bahkan kecanduan. Sebab yang menyatukan mereka adalah semangat untuk hidup sehat, menambah pergaulan, mempererat persahabatan dan persaudaraan. Tidak hanya soliditas internal komunitas, *goweser* juga peka terhadap lingkungan sekitarnya. Seringkali *goweser* mengadakan *tour* atau *funbike* yang diselingi dengan bhakti sosial, pembersihan sampah, penanaman pohon dan aksi kepedulian lingkungan dan sosial lainnya.

Gowes mengajarkan ASN pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, sehingga dapat membentuk kompetensi sosio kultural yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan Untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

Epilog

Tulisan ringan ini tentu belum dapat menjelaskan kompetensi dengan komprehensif baik secara konsep maupun dari peraturan yang berlaku bagi ASN. Ada banyak terminologi yang belum diperkenalkan seperti standar kompetensi yang meliputi identitas, kompetensi dan persyaratan jabatan, kamus kompetensi, indikator perilaku berikut leveling-nya. Agak berlebihan untuk berharap semua ASN baik yang *goweser* dan bukan *goweser* memiliki penguasaan atas segala hal tentang kompetensi terlebih bagi mereka yang tidak berkecimpung langsung di bidang manajemen SDM. Namun paling tidak tulisan ringan ini dapat lebih mengenalkan kompetensi ASN dalam perspektif *goweser*. Semoga bermanfaat. ●

Kalibata, 1 Agustus 2020

Pemanfaatan SAI PMF

WUJUD SEMANGAT BPK DALAM MEMBERI NILAI DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT



■ OLEH NILU EKA PUTRI,
KASUBBID
PEMERIKSAAN INTERNAL
DAN MUTU
KELEMBAGAAN II.B

Masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang independen dan yang dapat memberikan pendapat objektif atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga publik lainnya.

Supreme Audit Institution (SAI), merupakan lembaga pemeriksa yang lahir sebagai refleksi dari teori keagenan dalam sektor publik. Rakyat yang kemudian kita sebut sebagai Masyarakat merupakan prinsipel atau pemilik dari sumber daya negeri ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya tersebut demi semata-mata kemakmuran rakyat. Dalam interaksi antara masyarakat selaku pemilik dan pemerintah selaku pengelola, timbul hak dan kewajiban. Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangannya termasuk membuktikan bahwa pengelolaan yang dilakukannya telah ditujukan untuk semata-mata kemakmuran rakyat-sebagaimana amanah yang diembannya.

Apakah atas pertanggungjawaban tersebut, masyarakat secara serta merta dapat mempercayainya? Tentu saja tidak. Karena ada kepentingan yang berbeda, selalu ada risiko di mana pemerintah menyampaikan laporan yang tidak sebenarnya atau tidak sepenuhnya benar. Selain itu juga terdapat risiko bahwa masyarakat tidak mengetahui informasi yang sebenarnya tentang pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah.

Masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang independen dan yang dapat memberikan pendapat objektif atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga publik lainnya. Masyarakat membutuhkan SAI, masyarakat membutuhkan BPK. Hal ini dituangkan dalam Deklarasi Lima tahun 1977. Namun apakah hanya BPK yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan pendapat yang independen dan objektif atas pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah?

Sampai saat ini, iya. BPK beruntung karena kedudukannya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara ditetapkan dalam amandemen UUD 1945. Namun saat kita, melihat kembali lahirnya UUD 1945 yaitu merupakan refleksi kebutuhan masyarakat, adakah kemungkinan BPK terhapus dari dokumen tersebut? Mungkinkah BPK dianggap tidak diperlukan lagi? Tentu saja mungkin, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.

Bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi? Bagaimana agar BPK bisa bertahan memenuhi kebutuhan masyarakat? Satu kunci dari sebuah eksistensi adalah "Nilai dan Manfaat". Hanya yang memberi nilai dan manfaat saja yang dapat bertahan dan tak tergantikan. Kita tentu saja masih ingat lembaga negara yang akhirnya dihapuskan atau dibubarkan. Masih lekat dalam ingatan kita nasib merek *handphone* tertentu yang akhirnya terpaksa hengkang dari industri komunikasi setelah terkalahkan oleh fitur-fitur android. Dunia terus berubah, siapapun termasuk BPK harus bekerja keras mempertahankan nilai dan manfaatnya bagi masyarakat.

Bagaimana agar bisa bernilai dan bermanfaat?

Agar dapat memberikan nilai dan manfaat, INTOSAI- organisasi BPK sedunia- telah mengidentifikasi 3 tujuan dan 12 prinsip yang harus dipenuhi oleh BPK. Hal tersebut dituangkan dalam *INTOSAI Principle 12* tentang *Value and Benefit of SAI-making difference to the lives of Citizens*. 3 Tujuan dan 12 prinsip dari INTOSAI 12 diuraikan sebagai berikut:

1. Memperkuat akuntabilitas, transparansi dan integritas pemerintah dan entitas publik lainnya.
Memperkuat akuntabilitas, transparansi

dan integritas merupakan fungsi spesifik yang dimiliki oleh BPK sebagai lembaga yang independen. BPK harus menjaga agar fungsi ini tidak dapat tergantikan oleh lembaga manapun dengan cara memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Menjaga independensi
 - b. Melakukan audit untuk memastikan bahwa pemerintah dan entitas sektor publik akuntabel dalam menjaga dan menggunakan sumber daya.
 - c. Memberikan ruang dan kesempatan kepada pihak yang bertanggungjawab atas tatakelola sektor publik untuk menanggapi temuan dan rekomendasi audit serta mengambil tindakan korektif yang tepat.
 - d. Pelaporan atas hasil audit, yang memungkinkan masyarakat memperoleh akuntabilitas pemerintah dan entitas sektor publik.
2. Menunjukkan keselarasan yang terus menerus dengan pemangku kepentingan menjadi sejalas dengan pemangku kepentingan merupakan prasyarat untuk bisa bermanfaat. Karena itulah hal tersebut menjadi tujuan kedua yang harus dipenuhi BPK bila ingin tetap memiliki nilai dan manfaat. BPK tidak dapat melakukan audit atas hal-hal yang tidak menjadi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan kedua ini, prinsip yang harus dipenuhi adalah:
- a. Responsif terhadap lingkungan yang berubah dan risiko yang dihadapi
 - b. Berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan
 - c. Menjadi sumber wawasan dan bimbingan yang independen, objektif dan kredibel untuk mendukung perubahan di sektor publik.
3. Menjadi organisasi panutan melalui *leading by example*. BPK tidak dapat benar-benar mendorong akuntabilitas, transparansi dan integritas sektor publik bila di dalam dirinya sendiri tidak terdapat akuntabilitas, transparansi dan integritas yang baik. Tidak terdapat daya dorong dalam rekomendasi yang diberikan bila masyarakat tidak percaya bahwa BPK pun memiliki integritas yang tinggi dan juga mengelola proses internalnya secara akuntabel dan transparan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kepada BPK. Tujuan ini dicapai dengan cara memenuhi prinsip-prinsip berikut:
- a. Memastikan transparansi dan akuntabilitas BPK
 - b. Memastikan tata kelola yang baik di BPK
 - c. BPK mematuhi kode etik
 - d. BPK memberikan layanan yang unggul dan berkualitas
 - e. Peningkatan kapasitas melalui mempromosikan pembelajaran dan berbagi pengetahuan.

Untuk mengejawantahkan tujuan dan prinsip yang telah

disepakati oleh INTOSAI tersebut, dalam rangka memastikan bahwa BPK tetap dapat memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat, BPK telah menetapkan keputusan BPK Nomor 5 tahun 2020 tentang prinsip-prinsip Independensi, Transparansi dan Akuntabilitas, BPK juga telah menetapkan keputusan BPK nomor 6 Tahun 2020 tentang enam pilar Standar Pengendalian Mutu BPK. Enam pilar Standar Pengendalian Mutu BPK tersebut akan bersama-sama dengan Peraturan BPK nomor 4 tahun 2018 tentang kode etik BPK mengawal pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang dituangkan dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

Melalui keputusan BPK nomor 5 Tahun 2020 tentang Prinsip-Prinsip Independensi, Transparansi dan Akuntabilitas BPK, ditetapkan delapan prinsip independensi yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Independensi BPK dijamin oleh konstitusi.
- b. Independensi Ketua, Wakil dan Anggota BPK terkait pengangkatan, pemberhentian, dan perlindungan hukum termasuk keamanan atas kedudukan dan kekebalan hukum dalam pelaksanaan tugas, ditetapkan dalam Undang-Undang.
- c. Independensi BPK dalam bentuk kewenangan penuh untuk melaksanakan peran dan fungsinya.
- d. Independensi BPK dalam mengatur organisasinya
- e. Independensi BPK dalam penempatan, penugasan serta karier pelaksana BPK.
- f. Independensi BPK terkait keuangan dan anggaran.
- g. Independensi BPK dalam pelaksanaan peran dan fungsinya.
- h. Independensi Pelaksana BPK yang melaksanakan tugas.

Dalam keputusan tersebut juga telah ditetapkan Prinsip-Prinsip berkaitan Transparansi dan Akuntabilitas BPK yaitu:

- a. Undang-undang secara tegas menyatakan BPK melaksanakan peran dan fungsinya secara transparan dan akuntabel.
- b. BPK memublikasikan mandate, tanggung jawab, visi, misi dan strateginya.
- c. BPK memberlakukan standar, proses dan metodologi pemeriksaan yang objektif dan transparan.
- d. BPK memberlakukan standar etik yang tinggi.
- e. BPK menyakinkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap berlaku pada saat aktivitasnya dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- f. BPK mengelola kegiatannya secara ekonomis, efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memublikasikan hal tersebut.
- g. BPK memublikasikan hasil pemeriksaan dan kesimpulannya terhadap aktivitas pemerintah secara keseluruhan.
- h. BPK mengomunikasikan secara tepat waktu seluruh aktivitas dan hasil pemeriksaan melalui media masa, situs web dan mekanisme lainnya.

Untuk memberikan layanan yang unggul dan berkualitas (tujuan ketiga, prinsip 12 INTOSAI 12), BPK telah menetapkan Peraturan BPK noomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN merupakan ukuran kualitas dari pemeriksaan yang dilaksanakan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawab keuangan negara dikatakan berkualitas apabila memenuhi semua hal yang ditetapkan dalam SPKN. Untuk memastikan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan memenuhi SPKN, melalui Keputusan BPK nomor 6 Tahun 2020, BPK telah menetapkan Enam Pilar Standar Pengendalian Mutu BPK yaitu:

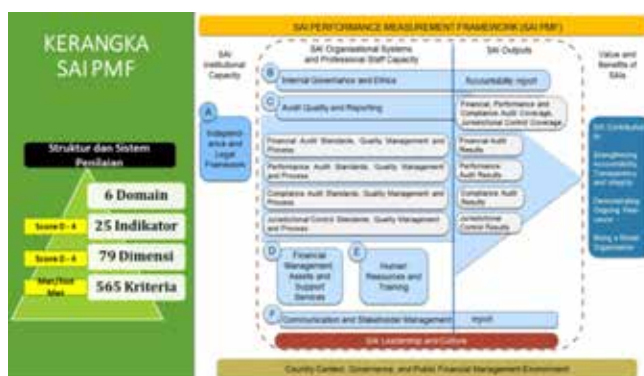
- Tanggung Jawab BPK atas mutu dilaksanakan dengan membentuk kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendorong budaya internal yang mengakui bahwa mutu merupakan bagian penting dalam melaksanakan pemeriksaan.
- BPK menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa BPK dan seluruh pelaksana BPK serta pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK patuh pada Kode Etik BPK dan peraturan disiplin pegawai yang berlaku.
- BPK membentuk kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa BPK hanya akan melaksanakan pemeriksaan bila BPK: kompeten dan memiliki kemampuan termasuk dari segi sumber daya, dapat mematuhi persyaratan etika yang berlaku dan telah mempertimbangkan integritas organisasi yang diperiksa dan mempertimbangkan bagaimana memperlakukan risiko yang timbul terhadap mutu.
- BPK membentuk kebijakan dan prosedur yang dirancang agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa BPK memiliki SDM yang cukup dan memiliki kompetensi, kapabilitas, dan komitmen pada prinsip-prinsip etika yang berlaku.
- BPK menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar dan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku dan bahwa BPK menerbitkan laporan yang sesuai dengan kondisi senyatanya.
- BPK menetapkan kebijakan dan prosedur agar dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan system pengendalian mutu telah relevan, memadai dan berjalan efektif.

SAI PMF sebagai alat untuk mengukur sejauh mana BPK telah memenuhi prinsip-prinsip dan standar yang telah ditetapkan, untuk tetap memberikan nilai dan manfaat kepada masyarakat

Apakah BPK yakin bahwa seluruh prinsip dan standar yang telah ditetapkan tersebut, telah dipenuhi? Untuk meya-

kinkan hal tersebut, dan untuk mendorong perbaikan yang terus menerus dalam rangka tetap memberikan nilai dan manfaat pada masyarakat, INTOSAI telah mengembangkan Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF). SAI PMF merupakan pengukuran holistik berdasarkan bukti untuk mengetahui kinerja SAI dalam memberikan nilai dan manfaat bagi masyarakat.

SAI PMF didasarkan kerangka pemikiran bahwa SAI harus memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, sebagai dasar untuk mengembangkan sistem internal organisasi dan kapasitas *professional staff*, kemudian menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kondisi tersebut yang dapat mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas dan integritas tata kelola keuangan negara, menunjukkan bahwa SAI relevan dengan kebutuhan masyarakat dan SAI adalah lembaga yang dapat dipercaya. Kerangka SAI PMF tersebut digambarkan sebagai berikut:



Kerangka SAI PMF menunjukkan bahwa SAI PMF membagi area pengukuran menjadi 6 domain yaitu:

- Domain A Independensi dan kerangka hukum
- Domain B Tata Kelola Internal dan etik
- Domain C Kualitas Audit dan pelaporan
- Domain D Manajemen Keuangan, Aset dan jasa pendukung
- Domain E Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
- Domain F Manajemen Komunikasi dan Pemangku kepentingan

Masing-masing domain tersebut akan dibagi menjadi satu atau beberapa indikator dan indikator akan dibagi menjadi beberapa dimensi yang memuat kriteria-kriteria. Definisi dan rincian masing-masing domain di uraikan sebagai berikut:

Indikator	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 1: Independensi	I. Kerangka konstitusional yang tepat dan efektif	18 Kriteria
	II. Otonomi/kemandirian finansial	
	III. Otonomi/kemandirian organisasional	
	IV. Independensi Pimpinan SAI dan para pejabatnya	
SAI 2: Mandat	I. Mandat yang cukup luas	22 Kriteria
	II. Akses terhadap informasi	
	III. Hak dan kewajiban untuk melaporkan	

Domain B : Tata Kelola Internal dan Etika

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 3	Siklus Perencanaan Strategis	I. Isi dari Rencana Strategis II. Isi dari Rencana Operasional/Pencapaian Tahunan III. Proses Perencanaan Organisasi IV. Pemantauan dan Pelaporan Kinerja	30 Kriteria
SAI 4	Lingkup Pengendalian Organisasi	I. Lingkup Pengendalian Internal - Kode Etik, Integritas, dan Struktur Organisasi II. Sistem Pengendalian Internal III. Sistem Pengendalian Kualitas IV. Sistem Pengawasan Kualitas	33 Kriteria
SAI 5	Pemeriksaan dan Pihak Ketiga	I. Proses Pemilihan Pemeriksa Pihak Ketiga II. Pengendalian Mutu Pemeriksaan oleh Pihak Ketiga III. Pemenuhan Kelayakan Mutu Pemeriksaan oleh Pihak Ketiga	18 Kriteria
SAI 6	Keperluan dan Komunikasi Internal	I. Keperluan dan Komunikasi Internal II. Komunikasi Internal	14 Kriteria
SAI 7	Pencapaian Pemeriksaan Secara Keseluruhan	I. Proses Pencapaian Pemeriksaan Secara Keseluruhan II. Isi Rencana Pemeriksaan Secara Keseluruhan	12 Kriteria

Domain C : Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan (Pemeriksaan Keuangan)

INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 8	Ruang Lingkup Pemeriksaan	I. Ruang lingkup pemeriksaan keuangan II. Ruang lingkup, pemfahan, dan lokasi pemeriksaan/kegiatan III. Ruang lingkup pengendalian/publikasi	19 Kriteria
SAI 9	Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu	I. Standar dan kebijakan pemeriksaan keuangan II. Kemampuan dan manajemen tim pemeriksaan keuangan III. Pengendalian mutu dalam pemeriksaan keuangan	39 Kriteria
SAI 10	Proses Pemeriksaan Keuangan	I. Perencanaan pemeriksaan keuangan II. Pelaksanaan pemeriksaan keuangan III. Evaluasi temuan pemeriksaan, pengendalian simpulan, dan pelaporan dalam pemeriksaan keuangan	39 Kriteria
SAI 11	Hasil Pemeriksaan Keuangan	I. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan keuangan II. Ketepatan waktu publikasi hasil pemeriksaan keuangan III. Pemantauan tindak lanjut SAI atas rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan	8 Kriteria

Domain C : Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan (Pemeriksaan Kinerja)

INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 12	Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu	I. Standar dan kebijakan pemeriksaan kinerja II. Kemampuan dan manajemen tim pemeriksaan kinerja III. Pengendalian mutu dalam pemeriksaan kinerja	11 Kriteria
SAI 13	Proses Pemeriksaan Kinerja	I. Perencanaan pemeriksaan kinerja II. Pelaksanaan pemeriksaan kinerja III. Pelaporan pemeriksaan kinerja	31 Kriteria
SAI 14	Hasil Pemeriksaan Kinerja	I. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan kinerja II. Ketepatan waktu publikasi hasil pemeriksaan kinerja III. Pemantauan tindak lanjut SAI atas rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja	9 Kriteria

Domain C : Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan (Pemeriksaan Kinerja)

INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 15	Standar Pemeriksaan Keperluan dan Manajemen Mutu	I. Standar dan kebijakan pemeriksaan keperluan II. Kemampuan dan manajemen tim pemeriksaan keperluan III. Pengendalian mutu dalam pemeriksaan keperluan	11 Kriteria
SAI 16	Proses Pemeriksaan Keperluan	I. Perencanaan pemeriksaan keperluan II. Pelaksanaan pemeriksaan keperluan III. Evaluasi temuan pemeriksaan, pengendalian simpulan, dan pelaporan hasil pemeriksaan keperluan	31 Kriteria
SAI 17	Hasil Pemeriksaan Keperluan	I. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan keperluan II. Ketepatan waktu publikasi hasil pemeriksaan keperluan III. Pemantauan tindak lanjut SAI atas rekomendasi hasil pemeriksaan keperluan	8 Kriteria

Domain C : Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan (Pemeriksaan Keperluan)

INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 15	Standar Pemeriksaan Keperluan dan Manajemen Mutu	I. Standar dan kebijakan pemeriksaan keperluan II. Kemampuan dan manajemen tim pemeriksaan keperluan III. Pengendalian mutu dalam pemeriksaan keperluan	11 Kriteria
SAI 16	Proses Pemeriksaan Keperluan	I. Perencanaan pemeriksaan keperluan II. Pelaksanaan pemeriksaan keperluan III. Evaluasi temuan pemeriksaan, pengendalian simpulan, dan pelaporan hasil pemeriksaan keperluan	31 Kriteria
SAI 17	Hasil Pemeriksaan Keperluan	I. Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan keperluan II. Ketepatan waktu publikasi hasil pemeriksaan keperluan III. Pemantauan tindak lanjut SAI atas rekomendasi hasil pemeriksaan keperluan	8 Kriteria

Domain D : Manajemen Keuangan, Aset dan Pendukung Lainnya

DEFINISI :

BPK harus mengelola operasinya secara ekonomi, etahn, efektif dan sesuai dengan hukum dan peraturan

BPK harus memiliki struktur manajemen dan dukungan organisasi yang tepat yang menyediakan tata kelola yang baik dan mendukung praktik pengendalian internal.

INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 21	Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	I. Manajemen Keuangan II. Perencanaan dan penggunaan aset dan infrastruktur yang efektif III. Layanan dukungan administratif	20 Kriteria

Domain E : Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

INDIKATOR, DIMENSI & JUMLAH KRITERIA PENGUKURAN :

Indikator	Uraian	Dimensi	Jumlah Kriteria
SAI 22	Manajemen Sumber Daya Manusia	I. Fungsi sumber daya manusia II. Strategi sumber daya manusia III. Rekrutmen sumber daya manusia IV. Retensi, promosi, dan kesejahteraan karyawan	29 Kriteria
SAI 23	Pelatihan dan Pengembangan Profesional	I. Rencana dan proses untuk pelatihan dan pengembangan profesional II. Pelaksanaan dan pengembangan profesional dalam hal pemeriksaan keuangan III. Pelatihan dan pengembangan profesional dalam hal pemeriksaan kinerja IV. Pelatihan dan pengembangan profesional dalam hal pemeriksaan kepatuhan	33 Kriteria

Bagaimana SAI PMF dapat mendorong peningkatan kapasitas organisasi?

Hasil penilaian SAI PMF akan sangat bermanfaat, pada saat ditindak lanjut oleh manajemen sehingga terjadi peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tersebut difasilitasi melalui proses manajemen strategis, sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Siklus tersebut merupakan siklus untuk meningkatkan nilai dan manfaat BPK kepada masyarakat secara berkesinambungan. Dengan SAI PMF, BPK dapat mendekteksi area-area yang membutuhkan perbaikan dan kemudian area tersebut, menjadi dasar peningkatan dalam proses manajemen strategis.

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartabpkri@gmail.com dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa *fee* menulis sebesar Rp750.000.



17 Agustus 2020

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menghadiri Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih, dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo.



30 Juli 2020

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LK Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2019 kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

28 Juli 2020

Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Pius Lustrilanang menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan LKPP Tahun 2019 kepada Kepala LKPP Roni Dwi Susanto di Kantor Pusat LKPP, Jakarta.



30 Juli 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bank Indonesia Tahun 2019 oleh Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang kepada Gubernur BI Perry Warjiyo.



3 Agustus 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2019 oleh Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang kepada Kepala PPATK Dian Ediana Rae di Kantor PPATK.



6 Agustus 2020

Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Pius Lustrilanang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2019 kepada Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso di Kantor OJK, Jakarta.

28 Juli 2020

Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK, Harry Azhar Azis memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Persiapan Pemeriksaan Anggaran Pandemi Covid-19, di Auditorium BPK, di Jakarta.



10 Agustus 2020

Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Tahun 2019 kepada Wakil ketua MPR Fadel Muhammad di Kompleks Gedung Parlemen, di Jakarta



10 Agustus 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun 2019 oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi kepada Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel di Kompleks Gedung Parlemen, di Jakarta.



10 Agustus 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Gedung Parlemen, di Jakarta. LHP diserahkan oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi kepada Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

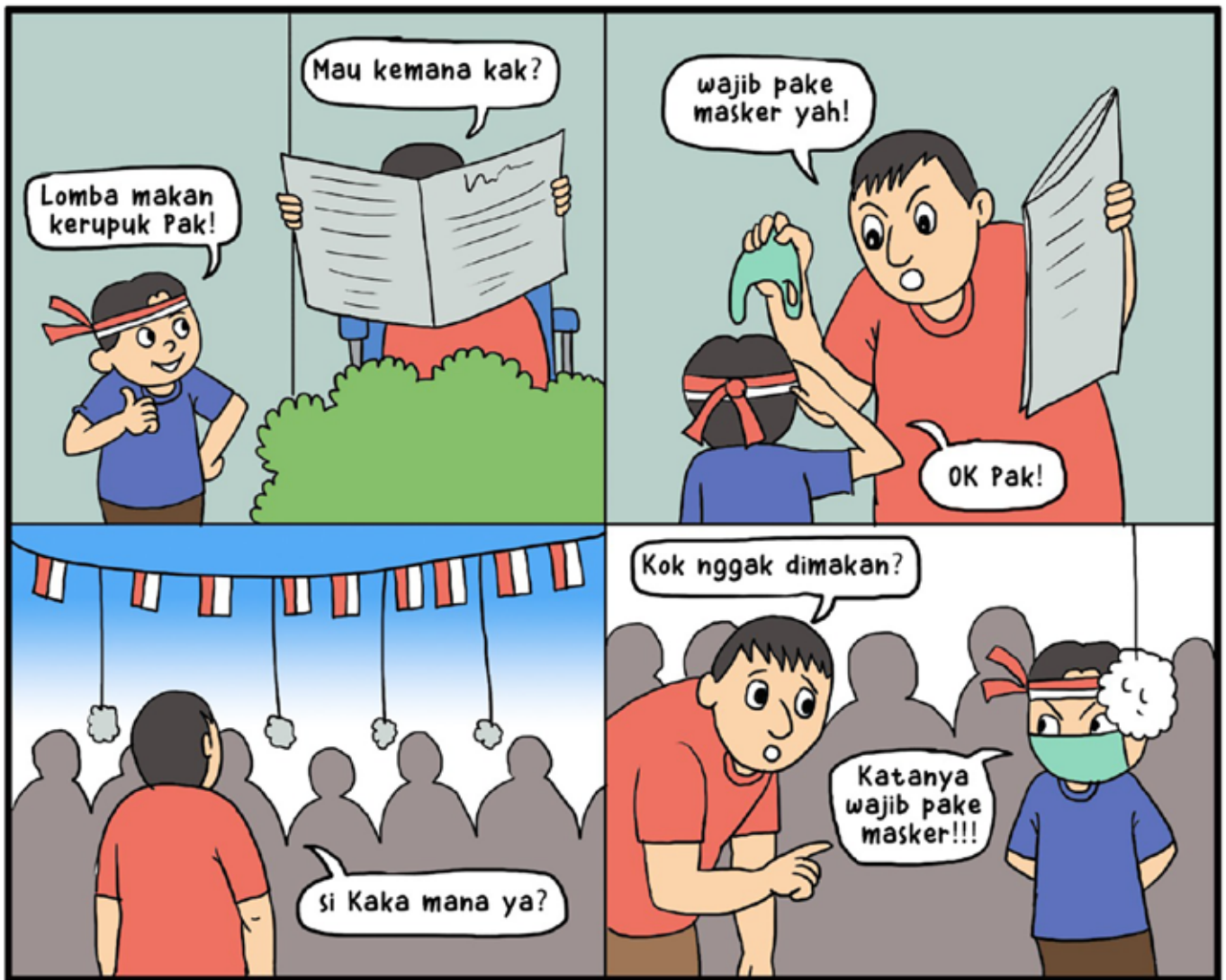
6 Agustus 2020

Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo Tahun 2019 kepada Menteri Kominfo Johnny G. Plate, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta.



13 Agustus 2020

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2019, oleh Anggota III BPK/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III Achsanul Qosasi kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.



Kuis



Pertanyaan:

Dalam majalah *Warta Pemeriksa* edisi Juli 2020, disebutkan 5 daerah yang menempati 5 peringkat besar indeks kemandirian fiskal daerah. Sebutkan kelima daerah tersebut.



Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email **wartabpkri@gmail.com** dengan subjek '**Kuis**'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



SEBERAPA JAUH KAMU MENGENAL BPK?

KATEGORI TEMA

PEGAWAI BPK
"Accountabilty for All"

PELAJAR/MAHASISWA
"Seberapa jauh kamu mengenal BPK?"

3 VIDEO TERBAIK*
@RP1.500.000 + SOUVENIR
10 VIDEO MENARIK*
@RP500.000 + SOUVENIR

*TIAP KATEGORI

FREE
REGISTRATION

SYARAT DAN KETENTUAN:

1. Peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) video;
2. Video harus orisinil, merupakan hasil karya sendiri;
3. Video dapat berupa video animasi atau rekaman video dengan menggunakan Handphone / Kamera Profesional.
4. Tema video untuk **pegawai BPK "Accountabilty for All"** dengan durasi video maksimal 6 menit yang menceritakan hasil pemeriksaan di lingkungan pekerjaannya atau kegiatan yang terkait tema di masing masing satuan kerja.
5. Tema video untuk **pelajar / mahasiswa "Seberapa jauh kamu mengenal BPK?"** dengan durasi maksimal 2 menit.
6. Tidak mengandung unsur SARA, tidak melanggar undang-undang hak kekayaan intelektual, pornografi, kekerasan, serta belum pernah di-publish atau dilikutsertakan dalam kompetisi lainnya;
7. Video yang dilombakan boleh hasil dari pembuatan video yang diproduksi paling lama 6 (enam) bulan terakhir sejak video dikirimkan;
8. Boleh menyertakan subtitle berbahasa Inggris dalam video;
9. Juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut bila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang ada;
10. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Seluruh hasil karya video yang dilombakan akan menjadi milik BPK;
12. Peserta dapat mendaftar dengan mengisi biodata diri dan mengunggah video melalui link <https://bit.ly/LombaVideoBPK>;
13. Pendaftaran peserta paling lambat tanggal **30 September 2020 Pukul 23:59 WIB**. Karya lomba yang masuk setelah batas waktu yang ditentukan, dianggap gugur.

CONTACT PERSON:

Nuri : 0812 9820 5717
Ridha : 0813 6383 1110



INDONESIA
MAJU

DIRGAHAYU
INDONESIA

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2020



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



www.bpk.go.id



BPK RI Official



@bpkri



@bpkriofficial